



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	I	
<b>IKHITISAR EKSEKUTIF</b>	Iii	
<b>DAFTAR ISI</b>	V	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A.	Kondisi Umum.	1
	1. Latar Belakang .....	1
	2. Maksud dan Tujuan.....	2
	3. Kondisi Dinas PPKB Kota Binjai Tahun 2020.....	3
	3.1. Susunan Organisasi .....	3
	3.2. Tugas Pokok dan Fungsi .....	4
	3.3. Sumber Daya Aparatur .....	8
	4. Sistematika Penulisan Laporan Kinerja 2020 .....	12
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018</b>	<b>14</b>
A.	Rencana Strategis .....	14
	1. Pernyataan Visi .....	14
	2. Pernyataan Misi .....	14
B.	Tujuan, Sasaran Strategis dan Program	
	1. Tujuan Strategis .....	16
	2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja .....	16
c.	Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	21
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>22</b>
A.	Capaian Kinerja Dinas PP dan KB Kota Binjai .....	22
	1. Target dan Realisasi Kinerja DPPKB 2011 -2015 .....	22
	2. Target dan Capaian Kinerja DPPKB 2016 -2021 .....	28
	3. Capaian Kinerja DPPKB Tahun 2019-2020 .....	34
B.	Analisis Capaian Kinerja DPPKB 2020.....	38

C.	Akuntabilitas Keuangan DPPKB 2020 .....	42
1.	Kendala/ Hambatan Pencapaian Target Tahun 2020...	42
2.	Keadaan Tahun 2020, Program Anggaran, Realisasi dan Capaian (%). .....	43
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	45
A.	Kesimpulan	47
B.	Saran	47
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN :</b>		
-	Perjanjian Kinerja Tahun 2020	
-	IKU Dinas PPKB	



## **KATA PENGANTAR**

Kita awali Tahun 2021 ini dengan berucap Syukur Alhamdulillah, karena atas Rahmat dan Hidayah Allah SWT, kita dapat melalui Tahun 2020 dengan baik. Sebagaimana kewajiban seperti tahun-tahun sebelumnya, diawal 2021 ini kami dari Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana (DPPKB) Kota Binjai telah menyelesaikan Laporan Kinerja (LK) Tahun 2020 dengan baik.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Laporan Kinerja (LK) ini kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap OPD Kota Binjai sebagai pertanggungjawaban Kinerja Selama 1 (satu) tahun yang akan menjadi acuan keberhasilan OPD tersebut dalam memenuhi target capaian kinerjanya sebagaimana yang telah direncanakan dalam RENSTRA OPD tersebut. Dengan kata lain LK adalah Dokumen akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atau pengguna anggaran.

Laporan Kinerja (LK) yang dahulu disebut dengan LAKIP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Disadari bahwa penyusunan Laporan Akuntabilitas (LK) DPPKB ini mungkin belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya telah dapat menunjukkan Akuntabilitas Kinerja Dinas PPKB selama Tahun 2020 secara keseluruhan.



*Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai*

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat diterima sebagai pertanggungjawaban kinerja DPPKB serta sebagai bahan peningkatan kinerja di masa mendatang bagi seluruh elemen yang berkepentingan, terutama seluruh Unit Kerja / Bagian di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai.

Binjai, Februari 2021  
**KEPALA DINAS PPKB KOTA BINJAI**  
  
**SDEWATI, SH, M.Kes.**  
**PEMBINA IAMA MUDA.**  
**NIP. 19630725 200502 2 001**



## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Azas dalam tata pemerintahan yang baik adalah azas akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan sesuai amanat/ mandate yang diterima. Azas akuntabilitas inilah yang dipakai untuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja (LK) merupakan pertanggung jawaban suatu Organisasi i Pemerintah Daerah ( OPD ) kepada Pemerintah Daerah dan Publik. Laporan Kinerja merupakan kewajiban untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan Pemerintah kepada masyarakat. Pertanggung jawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan Pemerintahan Daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta fungsi Pengawasan DPRD dan Publik terhadap jalannya Pemerintahan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LK) DPPKB mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada intinya Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai ini menyajikan/menggambarkan sejauh mana capaian kinerja Utama dan capaian kinerja per sasaran DPPKB selama satu tahun (2019), yang mengacu pada Rencana Strategi ( Renstra ) Dinas PPKB Tahun 2016 - 2021, dan juga tetap berpedoman pada RPJMD Kota Binjai Tahun 2016 - 2021.

Dari hasil Capaian Kinerja Dinas PPKB Kota Binjai selama Tahun 2020 ini yang telah mencapai lebih kurang 95% dan dianggap DPPKB telah **berhasil baik** dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pengelolaan administrasi serta pelayanan KB kepada masyarakat di Tahun 2020 tersebut .



## *Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai*

Hambatan utama dalam penyusunan LK ini adalah belum berjalannya secara utuh sistem Perencanaan Kinerja yang terukur, Pengumpulan Data Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Data Kinerja, hingga data kinerja dilaporkan dalam LK ini dianggap belum cukup memadai.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai, LK ini menyajikan berbagai capaian sasaran dalam berbagai bidang/ Program yang ada pada Dinas PPKB Kota Binjai yaitu :

1. Bidang Sekretariat
2. Bidang Keluarga Berencana
3. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (K3)
4. Bidang Pengendalian Penduduk

Pencapaian target kinerja Dinas PP dan KB Kota Binjai Tahun 2020 berdasarkan masing-masing Indikator dan Satuan Pengukurannya. Pada umumnya menunjukkan capaian kinerja yang memuaskan, yaitu berada dalam skala pencapaian kinerja 90% - 100 %.

Demikianlah Ikhtisar eksekutif Laporan Kinerja Dinas PPKB Tahun 2020 ini disampaikan, semoga kiranya dapat menjadi pembelajaran masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

**Binjai**      **Februari 2021**  
**KEPALA DINAS PPKB KOTA BINJAI**  
  
**Drs. ROSDEWATI, SH, M.Kes.**  
**PEMBINA UTAMA MUDA.**  
**NIP. 19630725 200502 2 001**



*Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai*

---



## **B A B I PENDAHULUAN**

---

### **1.1. Latar Belakang**

RPJMD merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah (Walikota) yang memuat kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, lintas kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD ini kemudian dijabarkan kedalam RENSTRA PD yang akan menentukan keberhasilan pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah dan Program Prioritas Daerah selama 5 Tahun kedepan.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan KB telah mengalami 3 kali Revisi. Pertama masih dalam bentuk Rancangan awal yang masih disebut Renstra Badan KB dan PP Kota Binjai Tahun 2016-2021 dibuat di Tahun 2016, pada Tahun 2017 direvisi karena adanya perubahan nomenklatur yaitu perubahan dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang mana Keluarga Berencana berdiri sendiri dan terlepas dari Pemberdayaan Perempuan, sehingga terjadi pula beberapa perubahan menyangkut hal tersebut. Lalu Kemudian karena adanya Perubahan RKPD Kota Binjai dan merubah RPJMD juga sehingga Renstra DPPKB harus di revisi kembali.

Jadi RENSTRA hasil revisi Tahun 2018 inilah yang kedepannya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan semua program dan kegiatan hingga tahun 2021. .



## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan RENSTRA SKPD antara lain adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;



*RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai 2016-2021*

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);



## *RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai 2016-2021*

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22);
18. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2011-2030.
19. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 1);
20. Peraturan daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai;
22. Peraturan Walikota Binjai Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dari penyusunan RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini antara lain adalah :

1. Memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh personil Dinas PPKB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait Perumusan Kebijakan Perencanaan Prgram KKBPK;
2. Memberikan informasi pada pemerintah daerah tentang Rencana Program dan Rencana Kerja DPPKB selama 5 (lima ) tahun kedepan;
3. Mempermudah Pengendalian Kegiatan serta Pelaksanaan Koordinasi dengan OPD terkait lainnya, terutama dengan Bappeda dan BPKAD;
4. Menjadi Kerangka Dasar dalam rangka peningkatan kualitas Kinerja Pelayanan DPPKB yang disesuaikan dengan target pembangunan Daerah, terutama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan.



## *RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai 2016-2021*

Sedangkan Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah :

1. Perencanaan Dinas PPKB selama lima (5) tahun (2016 – 2021)
2. Tantangan dan peluang serta-serta isu-isu strategis Dinas PPKB selama satu periode penyusunan Renstra.
3. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan program KKBPK;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan memuat latar belakang, Landasan hukum, Maksud dan tujuan Penyusunan dan sistematika penyusunan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD**

Bab ini berisi tentang tugas ,fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DPPKB, Sumber daya OPD , Kinerja Pelayanan OPD dan tantangan dan peluang pengembangan Perangkat daerah.

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD**

Bab ini berisi tentang Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan PD, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih, telaah Renstra BKKBN Pusat dan / BKKBN Provinsi serta teraksir penentuan isu-isu strategis;

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini dibahas mengenai Tujuan dan sasaran jangka menengah DPPKB serta Hubungan tujuan dan sasaran DPPKB dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Binjai;

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai Strategi dan arah kebijakan/ pedoman DPPKB untuk mencapai tujuan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan;

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN**

Bab VI ini membahas mengenai Program RPJMD yang sesuai dengan dengan tugas dan fungsi DPPKB beserta indikator kinerja



## *RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai 2016-2021*

program dan Pagu yang kemudian dijabarkan ke dalam Rancangan Kegiatan untuk setiap program tersebut.

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini membahas tentang Indikator Kinerja yang direncanakan akan dicapai DPPKB dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mencapai tujuan, sasaran serta program dan kegiatan

### **BAB VIII PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup atau akhir dari susunan Rancangan strategik Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini dimana didalamnya berisikan simpulan dan saran atas RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021 ini.



**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN DINAS PPKB**

---

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas PPKB**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 37 tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai di atur bahwa : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB ( dulu bernama Badan KB dan PP) mempunyai tugas mendukung program Kepala Daerah Terpilih (Walikota ) Binjai dalam hal mengatur masalah pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, dibantu oleh seorang sekretaris dan 3 orang Kabid (Kepala Bidang). Sekretaris membawahi 2 (dua) orang Kasubbag (Kepala Sub Bagian) dan Kabid membawahi masing-masing 3 (tiga) orang Kasi (Kepala Seksi).

Selain itu di tiap kecamatan di tugaskan pula seorang Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas (Ka.UPTD) yang membawahi beberapa orang Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) guna membantu melaksanakan program Keluarga Berencana.

Dinas PP dan KB Kota Binjai mempunyai fungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai Kependudukan dan Keluarga Berencana yang berorientasi pada pelayanan yang baik, dengan demikian diperlukan profesionalisme aparatur, transparansi dan akuntabilitas disertai dengan partisipasi dan dukungan masyarakat secara luas dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik (**Good Governance**). Dan selama 5 (lima ) tahun belakangan ini kinerja Dinas PP dan KB dinilai sangat memuaskan, baik itu dalam hal pelayanan kepada masyarakat maupun dalam hal pemenuhan kewajiban penyampaian laporan-laporan ke instansi terkait lainnya.



## *RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai 2016-2021*

Untuk melihat Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai dan Peraturan Walikota Binjai Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Binjai, dijelaskan bahwa DPPKB Kota Binjai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi 4 (empat) Bidang, yaitu :

### *1. Bidang Sekretariat*

Bidang Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang membawahi 2 (dua) orang Kepala Sub bagian, yaitu Kasubbag Perencanaan dan keuangan dan Kasubbag Tata Usaha yang tugasnya membantu Kepala Dinas dalam hal perencanaan program keuangan dan anggaran, dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi;

### *2. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi;*

Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yang bertugas antara lain: menyusun dan melaksanakan rencana operasional kegiatan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan ;

### *3. Bidang Keluarga Berencana*

Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi 3 (tiga) orang Kepala Seksi, dimana mempunyai tugas antara lain : merumuskan kebijakan program KB, motivasi serta pengendalian dan peningkatan kesehatan reproduksi, pengendalian kelahiran dan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, rencana pendistribusian obat/ alat kontrasepsi, melaksanakan pelayanan KB terpadu, pelayanan dengan Mobil Unit Pelayanan, melakukan pembinaan, bimbingan, penyuluhan, monitoring dan evaluasi serta peningkatan kualitas pelayanan, pengayoman dan rujukan;



## *RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai 2016-2021*

### *4. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi 3 (tiga) orang Kepala Seksi, mempunyai tugas antara lain :

membina, melaksanakan, mengevaluasi dan mengurus operasional kegiatan-kegiatan kelompok masyarakat seperti BKB, BKR, BKL dan IMP serta UPPKS, melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai kegiatan-kegiatan bagi kelompok-kelompok tersebut dan juga mengadakan lomba-lomba.

### *5. Unit Pelaksana Teknis Badan*

Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

### *6. Kelompok Jabatan Fungsional*

Jabatan Fungsional pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana hanya dijabat oleh Petugas Lapangan KB (PLKB) dengan SK langsung dari BKKBN Pusat dan digaji dari BKKBN Pusat juga.

## **2.2. Sumber Daya Dinas PPKB**

Jumlah Sumber Daya Manusia pada Badan KB dan PP (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kota Binjai per 31 Desember 2016 dan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :



**Tabel 2.2.1**  
**Jumlah SDM Badan KB dan PP Kota Binjai**

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	<b>Jumlah SDM per 01 Januari 2016</b>	17	62	79
2	<b>Mutasi selama Tahun 2016</b>	3	14	17
	Pensiun	0	0	0
	Mutasi Masuk	2	1	6
	Mutasi keluar	1	10	11
	Berhenti	0	0	0
	Meninggal	0	0	0
3	<b>Jumlah SDM per 30 Desember 2016</b>	18	53	71

Dari jumlah tersebut komposisi SDM berdasarkan jenjang jabatan (peran), strata pendidikan dan golongan SDM menunjukkan keadaan sebagai berikut :

**Table 2.2.2**  
**Jumlah SDM berdasarkan Jabatan sejak Tahun 2017**  
**(Setelah Perubahan Nomenklatur)**

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	<b>Pejabat Struktural</b>			
	- Eselon II	0	1	1
	- Eselon III	2	2	4
	- Eselon IV	4	9	13
2	<b>Pejabat Fungsional</b>	4	28	32
3	<b>Pelaksana / Staf</b>	8	13	21
	<b>Jumlah</b>	<b>18</b>	<b>53</b>	<b>71</b>



**Tabel 2.2.3**  
**Jumlah SDM berdasarkan Strata Pendidikan sejak Thn 2017**

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	S – 3			0
2	S – 2		5	5
3	S – 1	10	23	33
4	Diploma I/ III/ IV	1	13	14
5	SLTA	6	12	18
6	SLTP	1	0	1
7	SD	0	0	0
<b>Jumlah</b>				<b>71</b>

**Tabel. 2.2.4**  
**Jumlah SDM berdasarkan Golongan (2017)**

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	2	17	19
2	Golongan III	11	34	45
3	Golongan II	5	2	7
4	Golongan I	0	0	0
5	Tenaga Honorer	5	10	15
<b>Jumlah</b>				<b>86</b>

Untuk tenaga Fungsional Dinas PPKB dibantu oleh 32 orang Petugas Lapangan (PLKB) yang PNS dan 5 orang PLKB Non PNS di tiap-tiap kelurahan yang dipimpin oleh seorang Ka.UPTD di masing-masing kecamatan . PLKB PNS dengan SK dari BKKBN Pusat dan PLKB Non PNS inilah yang menjadi ujung tombak keberhasilan program KB karena mereka yang langsung berhubungan kepada masyarakat, baik itu dalam memberikan pelayanan KB maupun memberikan penyuluhan tentang KB, sehingga Laju Pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan.



## *RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai 2016-2021*

Untuk unit usaha yang dikelola oleh Dinas PP dan KB sampai saat ini ada UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera), dimana DPPKB memberikan bantuan berupa pembinaan dan juga modal dalam usaha peningkatan kesejahteraan anggota kelompok UPPKS tersebut, sedangkan pembinaan-pembinaan untuk kesejahteraan keluarga yang lain dapat dilihat dengan adanya kelompok-kelompok Tribina Percontohan yaitu : BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja) dan BKL (Bina Keluarga Lansia).

Khusus untuk pembinaan Remaja disekolah-sekolah dan di tiap Kelurahan dibentuklah PIK-R (Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja) dengan program Genre (Generasi Berencana), semua dibawah pembinaan DPPKB.

Mengenai aset yang berbentuk barang dan kondisi barang yang dimiliki oleh Dinas PPKB dijelaskan dalam tabel 2.2.5 berikut ini:

**Tabel 2.2.5**  
**Daftar Kondisi Aset 2016 - 2018**

No	Uraian	Kondisi Barang		Jumlah
		Baik	Rusak	
	- Tanah/Bangunan	1487 m2		1487 m2
	- Mobil Dinas	1 Unit		1 Unit
	- Mobil Mupen	1 Unit		1 Unit
	- Mobil Muyan	1 Unit		1 Unit
	- Mobil Akseptor	1 Unit		1 Unit
	- Mobil Box	1 Unit		1 Unit
	- Sepeda Motor	50 Unit	2 Unit	52 Unit
	- Mesin Genset	1 Unit		1 Unit
	- AC	11 Unit		11 Unit
	- Personal Computer	5 Unit		5 Unit
	- Laptop	10 Unit	1 Unit	11 Unit
	- Notebook	2 Unit	1 Unit	3 Unit
	- Printer	11 Unit		11 Unit
	- PC + Printer	5 Unit		5 Unit



No	Uraian	Kondisi Barang		Jumlah
		Baik	Rusak	
	- Wireless	1 Unit		1 Unit
	- Stabilisator	1 Unit		1 Unit
	- Dispenser	2 Unit		2 Unit
	- Kain gordyn	1 Set		1 set
	- Meja Kerja Es. II	1 Unit		1 Unit
	- Meja Kerja Es. III	3 Unit		3 Unit
	- Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	5 Unit		5 Unit
	- Kursi Kerja Pejabat	5 Unit		5 Unit
	- Kursi tamu	1 set		1 set
	- Kamera	3 unit	2 Unit	5 Unit
	- Peralatan Studio Visual lain	1 Unit		1 Unit
	Public Address	1 Unit	1 Unit	2 Unit
	- Mesin Ketik Manual	1 Unit	1 Unit	2 unit
	- Meja Rapat	3 Unit		3 unit
	- Kursi Rapat	100 Unit		100 Unit

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas PPKB

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai mempunyai sasaran/ target secara umum adalah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan program Keluarga Berencana. Untuk sasaran/target Renstra DPPKB adalah tercapainya jumlah penduduk yang seimbang dan terciptanya kesejahteraan bagi penduduk tersebut, hal ini dapat diukur pada kinerja DKBPP antara lain dalam hal:

1. Naiknya persentase CPR (Pemakaian Alat Kontrasepsi)
2. Turunnya TFR ( Angka Kelahiran)
3. Turunnya persentase PUS Unmetneed (Pasangan Usia Subur yang tidak berKB tapi tidak ingin punya anak lagi)
4. Turunnya persentase Perkawinan wanita usia dibawah 20 thn
5. Turunnya Laju Pertambahan Penduduk (LPP)
6. Bertambahnya jumlah anggota PIK-R
7. Bertambahnya jumlah Kelompok Kegiatan (POKTAN) seperti : BKB, BKR, BKR dan Kelompok UPPKS
8. Tersedianya Buku Umpan Balik
9. Dsb.



*RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai 2016-2021*

Mengenai indikator kinerja DPPKB ini dapat kita lihat pada tabel 2.3.1 dan 2.3.2 berikut ini :



*RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai 2016-2021*



*RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai 2016-2021*



*RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai 2016-2021*



#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PPKB**

Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana jenis pelayanan yang diberikan adalah Pelayanan KB yang langsung kepada masyarakat terutama dalam bentuk sosialisasi/ KIE melalui kader-kader KB yang telah dibina baik itu termasuk dalam kelompok Tribina yaitu BKB, BKR dan BKL bekerjasama dengan Posyandu, maupun melalui kelompok UPPKS, disamping itu ada juga yang melalui kelompok PIK-Remaja dan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di kampung KB.

Dalam melaksanakan program KKBPK ini ada beberapa tantangan yang dirasa perlu untuk di capai kedepan nantinya guna keberhasilan program KKBPK di Kota Binjai , tantang tersebut antara lain :

1. Kurangnya dana APBD yang mendukung program / Kegiatan Dinas PPKB yang besaran pagunya makin menurun tiap tahun, sehingga banyak kegiatan yang mendukung Program KKBPK tidak dapat dilaksanakan;
2. Belum adanya Perda/Perwa Kota Binjai yang mengatur tentang Pembangunan Kependudukan.

Setelah menentukan tantangan, kini saatnya melihat peluang-peluang apa yang ada yang nantinya akan dilaksanakan kedepannya untuk mencapai semua target yang telah ditetapkan di awal perencanaan Renstra DPPKB ini. Adapun Peluang-peluang tersebut antara lain :

1. Untuk tantangan pertama, peluang yang ada hanya dari koordinasi dengan Sekda selaku ketua TAPD / Walikota agar bisa ditambah anggaran/ pagu dana APBD untuk DPPKB.
2. Untuk masalah kedua peluang nya dengan mengadakan GDPK (Grand Design Pembangunan Kependudukan), yang diharapkan dapat menghasilkan suatu Perda/ Perwa tentang Pembangunan Kependudukan.



### **B A B III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PPKB**

---

##### **3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPPKB**

Seperti yang telah diuraikan diatas mengenai program-program Unggulan pada DPPKB terdapat permasalahan-permasalahan juga dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas tersebut yang kemudian menjadi isu-isu strategi yang harus segera dicarikan solusinya sehingga pelaksanaan semua program unggulan dapat terealisasi secara maksimal.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DPPKB yang intinya adalah pelayanan kepada masyarakat terutama dalam hal pengarahan, pembinaan dan penyediaan fasilitas guna pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dalam melaksanakan tugas dan fungsi diatas ada beberapa masalah yang dihadapi yang menjadi isu strategis yaitu:

1. Masalah kuantitas dan kualitas penduduk khususnya mengenai kesehatan maupun kesejahteraan, mobilitas penduduk, data dan informasi kependudukan;
2. Tentang perlu adanya penyerasian kebijakan pembangunan kependudukan, karena masih banyak yang belum sinkron antara satu dengan yang lainnya.

##### **3.2 Telaah Visi, Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih**

**Visi** adalah cara pandang jauh kedepan tentang kemana instansi Pemerintah harus dibangun agar dapat eksis, antisipasif dan inovatif, atau suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi Pemerintah.

Visi Kota Binjai adalah “ **Terwujudnya kota cerdas yang layak huni, berdaya saing dan berwawasan lingkungan menuju Binjai yang sejahtera** “



## *RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai 2016-2021*

**Misi** merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai, pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus yang harus dilaksanakan sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan, Misi juga merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Proses perumusan misi organisasi harus memperhatikan masukan dari pihak yang berkepentingan ( *Stake Holder* ) dan memberi peluang untuk perubahan sesuai dengan tuntutan lingkungan.

*Misi Kota Binjai adalah :*

1. Mewujudkan pemerintah yang cerdas melalui birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang bersih, efisien, demokratis dan terpercaya (Smart Goovernment);
2. Membangun sumber daya manusia berkualitas (Smart People) dengan kualifikasi pintar, sehat, produktif dan sejahtera;
3. Mengoptimalkan produktifitas pergerakan masyarakat (Smart Mobility) melalui kualitas infra struktur daerah yang mampu meningkatkan fungsi ekonomi, sosial dan budaya;
4. Meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam) berkelanjutan dan pengembangan SDM (Sumber Daya manusia) yang terampil, inovatif, kreatif, produktif (Smart Economy & Smart Environment);
5. Meningkatkan kualitas standard hidup (Smart Living) dalam aspek kelayakan, kesejahteraan,keadilan dan kenyamanan.

### **3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

Untuk Kementrian/ Lembaga yang megusung Program KB adalah BKKBN Pusat, dapat dilihat Visi BKKBN Pusat.

Misi BKKBN Pusat adalah : “ Menjadi Lembaga Yang Handal dan Dipercaya dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas “



**RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai 2016-2021**

Dengan Misi BKKBN Pusat sebagai berikut :

1. Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan;
2. Menyelenggarakan keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
3. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga;
4. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
5. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.

Dapat dilihat sasaran jangka menengah Renstra K/L BKKBN Pusat adalah :

**SASARAN RPJMN 2015 – 2019  
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KB (2)**



No	Indikator	Baseline (2014)	2017	2018	2019
<b>3. Pembinaan Remaja</b>					
a.	Angka kelahiran pada remaja kelompok usia 15-19 tahun Per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun	48 (SDG 2012)	42	40	38
b.	Median usia kawin pertama perempuan (Tahun)	20,1 (SDG 2012)	21	21	21
<b>4. Pembangunan Keluarga</b>					
a.	Persentase pemahaman dan kesadaran orangtua, remaja dan/atau anggota keluarga tentang fungsi keluarga (Persen)	5% (Survei RPJMN 2013, BKKBN)	30	40	50
<b>5. Regulasi, Kolaborasi, serta Data dan Informasi</b>					
a.	Menguatnya kapasitas kolaborasi pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana di pusat dan daerah	Benang nomenklatur dan kapasitas	Terbentuknya kolaborasi pembangunan bidang KKB secara bertahap	Terbentuknya kolaborasi pembangunan bidang KKB secara bertahap	Terbentuknya kolaborasi pembangunan bidang KKB secara bertahap
b.	Tersedianya landasan hukum dan kebijakan yang sinergi dan harmonis antara pembangunan bidang kependudukan dan KB terhadap bidang pembangunan lainnya	1. UU 52/2009 ttg Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 2. PP 87/2014 ttg perkembangan kependudukan, PK, KB dan Sistem Informasi Keluarga	Penetapan perundangan terkait dengan perkembangan program	Penetapan perundangan terkait dengan perkembangan program	Penetapan perundangan terkait dengan perkembangan program
c.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan KKB yang akurat dan tepat waktu, serta pemanfaatan data dan informasi tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.	Registrasi Penduduk, Sensus, Survei, Proyeksi, Data Sektoral dan kajian tentang KKB	Tersedianya dan pemanfaatannya data dan informasi pembangunan bidang KKB dari berbagai sumber	Tersedianya dan pemanfaatannya data dan informasi pembangunan bidang KKB dari berbagai sumber	Tersedianya dan pemanfaatannya data dan informasi pembangunan bidang KKB dari berbagai sumber



**PROYEK PRIORITAS PROGRAM KB YANG  
MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL 2019**

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK K/L
Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
			Pengelolaan permintaan dan pemenuhan kebutuhan alokasi di faskes
			Penyiapan Perencanaan kehidupan keluarga bagi remaja
			Peningkatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi berbasis Komunitas
Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Percepatan Penurunan Stunting	Peningkatan Pendidikan Gizi
			Peningkatan Promosi pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan

16

Untuk BKKBN Provinsi dengan Visi “ **Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas** “

**Mempunya Misi :**

1. Pengarus utamakan pembangunan berwawasan kependudukan;
2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
3. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga;
4. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
5. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten



**RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai 2016-2021**

Dengan Sasaran **Strategis** Jangka menengah sesuai dengan usulan dalam RPJMD 2018-2023 :

INDIKATOR	BASELINE TARGET 2014	TARGET KINERJA						2015-2020	LOKASI/SUMBER DATA
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1 Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2.60	2.37	2.36	2.33	2.31	2.28	2.21	2.21	SDKI
2 Persentase pemakaian kontrasepsi ( modern contraceptive prevalence rate/CPR)	57.9	60.5	60.7	60.9	61.1	61.3	72.54	72.54	SDKI
3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(%)	11.4 (8.6)	10.60	10.48	10.26	10.14	9.91	13.70	13.70	SDKI
4 Persentase peserta KB aktif (PA) MKJP	18.3	20.50	21.19	21.70	22.30	23.50	26.72	26.72	SDKI
5 Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)	27.1	26.0	25.7	25.3	25.0	24.6	13.82	13.82	SDKI



**SASARAN STRATEGIS (INDIKATOR KINERJA UTAMA)  
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
(USULAN DALAM RPJMD 2018-2023)**

No	INDIKATOR	KONDISI AWAL (TAHUN 2017)	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,91	2,79	2,76	2,73	2,71	2,68
2	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	48,3	53	55	58	60	62
3	Usia Kawin Pertama (UKP) bagi wanita (tahun)	-	21,84	21,87	21,91	21,94	21,98

19

Sedangkan untuk Sasaran jangka Menengah DPPKB Kota Binjai adalah :

No	Sasaran Strategis	Kondisi Awal (2016)	Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	221
2	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	48,3	53	55	58	60	73
3	Usia Kawin Pertama bagi wanita	20	21	21	21	21	21



### *RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai 2016-2021*

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa faktor pendorong Capaian Kinerja DPPKB jika dilihat dari Sasaran Jangka menengah BKKBN Pusat dan BKKBN Provinsi adalah :

1. Sudah tercapainya target untuk kota Binjai untuk pencapaian kenaikan persentase CPR
2. Sudah tercapainya target untuk kota Binjai untuk pnurunan persentase TFR
3. Sudah tercapainya target usia kawin pertama bagi wanita di Kota Binjai yang rata-rata usia 21 thn

Dalam hal ini tidak ada faktor Penghambat jika dihubungkan dengan sasaran jangka Menengah K/L maupun dengan Provinsi, dan dianggap Kota Binjai telah berhasil dalam program KKBPK.

#### **3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan telaah rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang ada pada RPJMD Kota Binjai 2016-2021 masalah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan masalah yang sangat mempengaruhi rencana dan kajian tersebut, yang mana

bila pertumbuhan penduduk tidak dapat dikendalikan maka banyak permasalahan yang timbul antara lain masalah hunian yang padat, perekonomian yang tidak berkembang /kurang nya kesejahteraan penduduk sehingga rencana tata ruang wilayah akan sangat sulit untuk dilaksanakan dengan baik .

Lalu masalah kesehatan masyarakat terutama ibu dan anak akibat kelahiran yang tidak terencana menjadikan kajian lingkungan hidup yang tidak baik/ tidak sesuai seperti yang diharapkan.



### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Dari adanya tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas PPKB Kota Binjai dengan menggunakan metode Analisis SWOT, maka akan dapat ditentukan isu -isu strategis dari Dinas PPKB.

Metode analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis untuk mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam usaha mencapai tujuan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Pengertian Metode Analisis SWOT diatas yaitu :

1. *S (Strengths)*

Yaitu Kekuatan, merupakan analisis kekuatan/ sumber daya / keunggulan-keunggulan yang dimiliki Dinas PPKB untuk mencapai target kinerja sesuai dengan Tugas dan fungsinya seperti yang telah dijabarkan dalam RPJMD;

2. *W (Weaknesses)*

Yaitu Kelemahan, merupakan metode untuk melihat kelemahan/ kekurangan Dinas PPKB dengan membandingkan dengan OPD lain sehingga dapat memperbaiki diri dan lebih meningkatkan kinerja;

3. *O (Opportunities)*

Yaitu Peluang, yang biasanya dilihat diawal perencanaan untuk lebih memaksimalkan target kinerja yang ingin dicapai, baik itu peluang untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

4. *T (Threats)*

Yaitu Ancaman, analisis ini merupakan analisis yang sangat penting untuk mendapatkan hasil/ target yang terbaik, karena dengan melihat ancaman yang akan datang, maka Dinas PPKB akan lebih bersiap diri.

Jadi secara umum dengan menggunakan analisis SWOT ini maka setelah melihat hubungan antara Tantangan dan Peluang hingga akhirnya ditemukan isu-isu strategis Dinas PPKB Kota Binjai ,yaitu:

1. Kurangnya dana kegiatan yang mendukung Program KBPK dan diharapkan agar Ketua TAPD dapat memperhatikan dan mempertimbangkan untuk menambah Pagu Anggaran APBD untuk Dinas PPKB
2. Belum tersedianya Peraturan Daerah/ Peraturan Walikota Binjai mengenai Pembangunan Kependudukan.



**B A B IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

---

**4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPPKB**

**Tujuan** merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau yang dihasilkan dalam jangka 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) Tahun serta harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif untuk menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan - perbaikan yang ingin diciptakan.

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan semua permasalahan dan pengembangan SKPD.

*Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB yang utama adalah :*

1. Pembinaan dan Pelayanan KB Kepada Masyarakat;
2. Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk dengan program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga);

Tujuan ini sesuai dengan Misi Pertama dan Misi ke Lima dari RPJMD yaitu :

Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang cerdas (Smart Governance) dan

Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Standar Hidup (Smart Living)

**Sasaran** merupakan penjabaran secara detail atau implementasi dari tujuan merupakan target yang akan dicapai atau yang dihasilkan dalam jangka 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) Tahun dan selaras dengan tugas pokok dan fungsi.



### *RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai 2016-2021*

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun yang menjadi Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adaah :

1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk;
2. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai untuk Pelayanan Keluarga BerencanaMeningkatkan mutu pelayanan dalam program KB;
3. Meningkatnya Angka Pemakaian Kontrasepsi;
4. Menurunkan TFR (Total Fertility Rate) atau menurunkan persentase rata-rata jumlah total anak yang dilahirkan diusia subur;
5. Menurunnya Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin anak tapi tidak ber KB;
6. Meningkatnya jumlah anggota Kelompok BKB, BKR ,BKI dan UPPKS yang ber KB
7. Terlaksananya Pembinaan Program KKPBK kepada kelompok-kelompok kegiatan (POKTAN) yang ada di Masyarakat;
8. Pembinaan dan Konseling bagi Calon Pengantin (CaTin);
9. Menurunnya angka kelahiran remaja perempuan usia 15-19.

Pada tabel 4.1 di bawah ini dapat kita lihat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas PPKB Kota Binjai



*RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai 2016-2021*



#### **4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran DPPKB dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Dalam RPJMD Kota Binjai Tahun 2016-2021 Bab 5 yang isinya mengenai Tujuan RPJMD Kota Binjai, dapat dilihat hubungan atau kesesuaian antara tujuan dan sasaran RPJMD Kota Binjai dengan Tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai, khususnya Misi 1 dan Misi ke 5 yaitu :

**Misi 1 : “Mewujudkan pemerintahan yang cerdas (Smart Governance) melalui birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya”**

Dengan tujuan :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
2. Meningkatkan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME serta kerukunan hidup antar umat beragama, peran pemuda, olah raga dan seni budaya.

Dengan Sasaran :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik;
3. Terwujudnya perluasan partisipasi publik dalam pembangunan;



*RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai 2016-2021*

Misi 5 : **“Meningkatkan Kualitas Standar Hidup (Smart Living) dalam aspek kelayakan, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan”**

Dengan Tujuan :

Mewujudkan peningkatan kualitas standar hidup layak, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan.

Dengan sasaran sebagai berikut :

Terwujudnya peningkatan kualitas standar hidup layak, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan.

Hubungan antara Tujuan dan Sasaran DPPKB dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Binjai dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:



*RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai 2016-2021*



*RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai 2016-2021*



**B A B V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

---

**5.1 Strategi dan Arah Kebijakan SKPD**

Strategi merupakan dasar dalam menjabarkan berbagai program prioritas guna mewujudkan sasaran. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, disusunlah strategi dan kebijakan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Strategi juga merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran 5 (lima) tahun kedepan dengan efektif dan efisien dengan berpedoman kepada RPJMD.

Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra DPPKB adalah strategi strategi dan kebijakan DPPKB untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Rancangan Awal RPJMD.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra DPPKB selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan DPPKB bagi setiap program prioritas.

Strategi dan Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang telah disesuaikan dengan RPJMD Kota Binjai dapat dilihat pada tabel 5.1



*RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai 2016-2021*



## **B A B VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

---

#### **6.1 Rencana Program dan Kegiatan SKPD**

Sebagai Perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. dimana semua program di tiap SKPD sudah di tetapkan dalam suatu system yang disebut SIMDA yang mana isinya sesuai dengan RPJMD.

*Program dari Dinas PPKB yang ada antara lain:*

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Penguatan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Keluarga Berencana;
7. Program Kesehatan Reproduksi;
8. Program Pelayanan Kontrasepsi;
9. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri;
10. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Setelah keluarnya Tupoksi baru Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai Peraturan Walikota Binjai Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai, dan dengan melakukan telaah



## *RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai 2016-2021*

pada program Kementrian dan Lembaga serta Provinsi, maka ditambahkan lagi satu program/kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian penduduk yang menjadi program ke 11. Yaitu:

### 11. Program Pengendalian Penduduk

Diharapkan dengan program baru ini nanti dapat lebih memaksimalkan kinerja DPPKB kedepannya.

Program pada DPPKB merupakan program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPPKB. Rencana Program Prioritas beserta indikator kinerja program dan Pagu DPPKB dalam Rancangan Awal RPJMD selanjutnya dijabarkan Dinas PPKB ke dalam Rencana Kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Pemilihan Kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah DPPKB. Indikator Kinerja Program Prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang pada prinsipnya berisi outcome program. Outcome merupakan hasil yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

## **6.2 Langkah- langkah Perumusan Rencana Program dan Kegiatan**

Langkah-langkah yang harus diambil untuk merumuskan Rencana Program dan Kegiatan antara lain :

- a. Menyesuaikan indikator program dan pagu Anggaran untuk 1 Tahun;
- b. Merumuskan target outcome program untuk mencapai sasaran pembangunan;
- c. Melakukan perumusan target output (keluaran) yang akan dihasilkan melalui kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai target outcome program Dinas PPKB;
- d. Merumuskan kegiatan dengan menghitung biaya kegiatan dan total biaya per program;
- e. Menyusun rincian target outcome program ke dalam target tahunan, lalu kemudian disusunlah perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan program pertahun.



***RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai 2016-2021***

Rencana Program dan kegiatan DPPKB dapat dilihat pada tabel 6.1 di bawah ini :



*RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai 2016-2021*



*RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai 2016-2021*



*RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai 2016-2021*



*RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai 2016-2021*



*RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai 2016-2021*



*RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai 2016-2021*



## **B A B VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

---

#### **7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Indikator Penyelenggaraan bidang urusan adalah indikator kinerja yang direncanakan akan dicapai Dinas PPKB dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan, sasaran serta program dan kegiatan.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, indikator kinerja dapat pula diartikan sebagai ukuran keberhasilan yang akan dicapai dalam program/kegiatan yang direncanakan.

*Adapun tujuan indikator kinerja adalah :*

1. Memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu program/kegiatan dilaksanakan;
2. Menciptakan konsesus yang dibangun bersama oleh pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kegiatan dan dalam menilai kinerjanya;
3. Membangun dasar untuk pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja organisasi/ unit kerja masing—masing.

Indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai harus mengacu pada sasaran RPJMD yang juga berpedoman pada visi dan misi RPJMD tersebut.

Sesuai dengan misi Pertama dan Kelima yaitu :

“ Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dalam berbangsa, bernegara, religius dan berdaya saing”

Juga pada tujuan kedua yaitu : “ Mewujudkan masyarakat yang sehat”

Dari Misi dan tujuan tersebut diatas dapat dilihat sasarannya adalah :

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
2. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan;
3. Meningkatnya program KB pada kampung KB



### *RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai 2016-2021*

Dengan berpedoman pada indikator kinerja yang sesuai dengan Sasaran RPJMD tersebut diatas, maka dapat di tetapkan Indikator Kinerja Dinas PPKB Kota Binjai. Kinerja Program dan Kegiatan Renstra 2016-2021 yang telah disesuaikan dengan RPJMD dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut ini :



*RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai 2016-2021*



**B A B VIII**  
**P E N U T U P**

**8.1 Kesimpulan**

Dapat disimpulkan bahwa RENSTRA (Rencana Strategik) Tahun 2016 - 2021 Revisi tahun 2020 yang berpedoman pada RPJMD Kota Binjai tahun 2016-2021 ini merupakan Rencana Strategis untuk 5 (lima) tahun kedepan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai sebagai pedoman/ dasar pelaksanaan semua program/kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tata laksana yang berlaku untuk membantu mewujudkan visi misi Kepala Daerah / Walikota terpilih.

**8.2 Saran**

Agar semua Program/kegiatan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai yang telah direncanakan untuk 5 (lima )Tahun kedepan dalam Renstra ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan dengan capaian target yang memuaskan, maka diharapkan dukungan dari pihak-pihak terkait, baik dari segi Pembinaan maupun dari segi pendanaan , sehingga diperoleh keberhasilan pelaksanaan Program/ kegiatan mencapai 100% atau minimal diatas 50 %, pembangunan Kota Binjai akan lebih maju lagi dimasa yang akan datang.

Smoga segala kendala yang akan menghambat nantinya dapat diatasi dengan sebaik-baiknya dan didapatkan hasil pencapaian maksimal dalam masalah pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Binjai, Februari 2021

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KOTA BINJAI**



**Drg. LILIK ROSDEWATI, M.Kes**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19630725 198902 2 001**

# **B A B I**

## **PENDAHULUAN**

---

### **A. KONDISI UMUM**

#### **I. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka terselenggaranya **Good Governance** diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Media Pertanggung jawaban tersebut disajikan melalui Laporan Kinerja (LK) SKPD. Laporan Kinerja ini merupakan media informasi pertanggung jawaban Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai yang isinya menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja instansi atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam hubungannya dengan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) dan RPJMD Tahun 2016 – 2021.

Secara teknis substantif penyusunan LAKIP merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan dilatar belakangi aturan hukum tersebut, DPPKB Kota Binjai mencoba melakukan pengembangan mekanisme pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada dalam Rencana Strategik Dinas PPKB Kota Binjai dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kota Binjai tahun 2016 -2021.

## II. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP 2020

Laporan Kinerja ( LK ) Dinas PPKB ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan mempedomani Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Permen PAN dan RB, ini memberikan tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LK) memiliki 2 (dua) fungsi utama sekaligus. **Pertama**, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sasaran bagi Dinas PPKB Kota Binjai untuk mempertanggungjawabkan kinerja kepada seluruh stakeholders/ penguasa (Walikota, DPRD, masyarakat). **Kedua**, Laporan Kinerja merupakan sasaran evaluasi atas pencapaian Dinas PPKB Kota Binjai selama satu Tahun sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Fungsi utama Laporan Kinerja (LK) Dinas PPKB Kota Binjai Tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut, yaitu :

1. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi menjadikan LK Tahun 2020 sebagai sarana pertanggung jawaban Dinas PPKB kota Binjai atas capaian kinerja yang dilaporkan yakni, sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/ sasaran strategi yang telah ditetapkan dapat dicapai selama Tahun 2020.
2. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi menjadikan LK Tahun 2020 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh Dinas PPKB Kota Binjai dalam upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang agar setiap nilai kinerja yang diperoleh manajemen Dinas PP dan KB Kota Binjai dapat merumuskan strategi pemecahan masalah sehingga capaian kinerja Dinas PP dan KB Kota Binjai dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

### **III. KONDISI DINAS PPKB KOTA BINJAI**

#### **3.1. Susunan Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor : 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Pemerintah Kota Binjai dan Peraturan Walikota Binjai Nomor : 37 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai.

Dinas PPKB Kota Binjai merupakan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Kinerja pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas PPKB Kota Binjai mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
- b. Melaksanakan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
- d. Melaksanakan administrasi dinas sesuai bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor : 37 Tahun 2017 juga dijelaskan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi
- d. Bidang Keluarga Berencana
- e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- f. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

### **3.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Tugas Pokok dan dan Fungsi Bidang-bidang yang ada antara lain adalah :

#### **1. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris juga bertugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian, perencanaan, program keuangan dan anggaran, dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi kegiatan dilingkungan dinas ;
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran dengan koordinasi dari masing-masing bidan dan sekretariat ;
- c. Menyusun dan menghimpun bahan perumusan kebijakan atau petunjuk teknis sebagai bahan penetapan kebijakan pemimpin ;
- d. Penginventarisan pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin dan operasional ;
- e. Penyusunan laporan Kinerja Dinas berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing bidang sekretariat;

- f. Mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja ;
- g. Mengkoordinir penyusunan standar operasional prosedur ;
- h. Mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) ;
- i. Mengkoordinir penyusunan Laporan kinerja (LK), Perjanjian Kinerja (PK), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) ;
- j. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, urusan perlengkapan dan pengawasan aset Dinas ;
- k. Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan ;
- l. Pelaksanaan pembinaan kepada bawahan ; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Dan Informasi**

Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan rencana operasional kegiatan dan fasilitas dibidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi keluarga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk, Sistem informasi keluarga, Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- b. Pelaksanaan kebijakan Teknis dibidang Pengendalian Penduduk, Sistem informasi keluarga, Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bidang Pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;
- c. Pelaksanaan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) dibidang Pengendalian Penduduk, Sistem informasi keluarga, Advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) bidang pengendalian penduduk dan keluarga Berencana ;
- d. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data dan informasi pengendalian lapangan, pelayanan KB dan data keluarga ;
- e. Pelaksanaan pengolahan infrastuktur Teknelogi informasi dan sistem aplikasi program KB ;
- f. Pelaksanaan pengolahan sistem informasi keluarga pengendalian lapangan, pelayanan KB dan pendataan keluarga/updating data keluarga ;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Advokasi informasi dan edukasi (KIE);
- h. Pelaksanaan Penyalagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB) dan Instituti masyarakat perkotaan (IMP);
- i. Pelaksanaan pembinaan tenaga PKB/PLKB serta mekanisme operasional lini lapangan ;
- j. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk ;
- k. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk ;
- l. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, advokasi dan KIE dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;
- m. Pemberian bimbingan teknis dan dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Advokasi dan KIE bidang pengendalian penduduk dan KB ;

- n. Pelaksanaan pembinaan kepada bawahan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya ;

### **3. Bidang Keluarga Berencana**

Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang yang didalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang keluarga berencana meliputi pengendalian dan pendistribusian alokon, jaminan pelayanan KB, Pembinaan dan Peningkatan kesertaan KB ;
- b. Pelaksanaan Kebijakan teknis dibidang Keluarga Berencana meliputi pengendalian dan pendistribusian alokon, jaminan pelayanan KB pembinaan dan Peningkatan kesertaan KB;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan Norma Standar Prosedur Kreteria dibidang Keluarga Berencana, Pengedalian dan pendistribusian alokon, jaminan Pelayanan KB, Pembinaan dan peningkatan kesertaan KB;
- d. Pelaksanaan penerimaan , penyimpanan, pengendalian, dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi ;
- e. Pelaksnaan operasional pelayanan KB dan jaminan pelayanan KB ;
- f. Pelaksanaan Pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB ;

- g. Pelaksanaan Pembinaan dan peningkatan peran pria dalam ber KB ;
- h. Pelaksanaan Pembinaan dan sosialisasi kesehatan reproduksi dan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak;
- i. Pelaksanaan Pemantauan dan kriteria fasilitas kesehatan KB (Faskes KB) dan Penganggulan kegagalan, komplikasi dan efek samping ;
- j. Pelaksanaan Penyusunan, penyiapan dan pengembangan kerjasama kegiatan terpadu program KB lintas sektoral;
- k. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang keluarga berencana ;
- l. Pemberian Bimbingan teknis dan fasilitas dibidang Keluarga Berencana ;
- m. Pelaksanaan Pembinaan kepada bawahan ;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya ;

#### **4. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga meliputi pemberdayaan keluarga sejahtera, bina keluarga balita, bina keluarga lansia, bina keluarga remaja dan pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R), institusi masyarakat perkotaan (IMP) dan kader KB ;

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga meliputi pemberdayaan keluarga sejahtera, bina keluarga balita, bina keluarga lansia, bina keluarga remaja dan pusat informasi dan konseling remaja (PIK R), institusi masyarakat Perkotaan (IMP) dan kader KB ;
- c. Pelaksanaan Norma Standar prosedur Kriteria (NSPK) dibidang ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ;
- d. Pelaksanaan identifikasi, analisa, evaluasi, tentang pemberdayaan keluarga sejahtera, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan konseling remaja (PIK R), Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) dan kader KB ;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitas bina keluarga balita (BKB), Bina keluarga lansia (BKL), Bina keluarga remaja (BKR), dan pusat informasi dan konseling remaja (PIK R) ;
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitas pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga (UPPKS) dan usaha mikro lainnya ;
- g. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan institusi masyarakat perkotaan (IMP) dan kader KB;
- h. Pelaksanaan penilaian/lomba dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/institusi dalam pelaksanaan kegiatan terpadu sesuai dengan momentum;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga ;
- k. Pelaksanaan pembinaan kepada bawahan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

## 5. Unit Pelaksana Teknis

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Sampai dengan Tahun 2018 ada 5 (Lima) KUPTD yang berada dibawah naungan Dinas PPKB yang mempunyai tugas sebagai Koordinator Petugas Lapangan (PLKB) ditiap Kecamatan, tapi di tahun 2019 2 KUPTD telah di ganti dengan Koordinator Kecamatan saja karena telah memasuki masa pensiun.

## 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai terdapat kelompok jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi disebut dengan PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) yang bertugas sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku, yang mana mulai Tahun 2018 PLKB telah menjadi kewenangan BKKBN Pusat baik mengenai gaji maupun Tunjangan Kerjanya, dan ditahun 2018 ada lebih kurang 35 PLKB yang berada dibawah naungan DPPKB Kota Binjai.

## 3.3 SUMBER DAYA APARATUR

Jumlah SDM pada Badan PP dan KB Kota Binjai per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Jumlah SDM Dinas PPKB Kota Binjai

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	<b>Jumlah SDM per 31 Desember 2020</b>	81
2	<b>Mutasi selama Tahun 2020</b>	8
	Pensiun	2
	Mutasi Masuk	5
	Mutasi keluar	1
	Berhenti	0
	Meninggal	0
3	<b>Jumlah SDM per 31 Desember 2020</b>	81

Dari jumlah tersebut komposisi SDM berdasarkan jenjang jabatan, strata pendidikan dan golongan SDM menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Table 1.2  
Jumlah SDM berdasarkan Jabatan

No	Uraian	Jumlah (Orang)
<b>1</b>	<b>Pejabat Struktural</b>	19
	- Eselon II	1
	- Eselon III	4
	- Eselon IV (Kasubag, Kasi dan KaUPTD)	14
<b>2</b>	<b>Pejabat Fungsional</b>	30
<b>3</b>	<b>Pelaksana / Staf</b>	32
<b>Jumlah</b>		<b>81</b>

Tabel 1.3  
Jumlah SDM berdasarkan Strata Pendidikan

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	S – 3	0
2	S – 2	7
3	S – 1	34
4	Diploma I/ III/ IV	30
5	SLTA	10
6	SLTP	0
7	SD	0
<b>Jumlah</b>		<b>81</b>

Tabel. 1.4  
Jumlah SDM berdasarkan Golongan

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	17
2	Golongan III	41
3	Golongan II	4
4	Golongan I	0
5	Tenaga Honorer	19
<b>Jumlah</b>		<b>81</b>

#### IV. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN KINERJA 2020

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka format penyusunan Laporan Kinerja (LK) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai terdiri dari :

- Bab I Pendahuluan** : Menggambarkan Pendahuluan yang memuat Kondisi Umum yaitu latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LK, Kondisi Dinas PPKB Kota Binjai, baik susunan Organisasi, Tupoksi dan Sumber Daya Aparaturnya serta sistematika Penulisan laporan.
- Bab II Perencanaan Kinerja** : Menggambarkan tentang Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang didasari oleh Rencana Strategik Dinas PPKB Kota Binjai Tahun 2020 yang berpedoman pada Renstra DPPKB maupun RPJMD Tahun 2016 -2021 , baik itu pernyataan Visi,Misi, Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja.

- Bab III Akuntabilitas Kinerja** : Menggambarkan Akuntabilitas kinerja yang mencakup Pengukuran Capaian Kinerja, Analisis Capaian kinerja, baik tentang target, kendala dan hambatan serta tentang Akuntabilitas keuangan atau realisasi anggaran dari setiap program kegiatan yang ada pada Dinas PP dan KB Kota Binjai.
- Bab IV Penutup** : Merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran sebagai umpan balik untuk tahun mendatang

Disamping itu sebagai data pendukung juga dilampirkan :

- Perjanjian Kinerja Tahun 2020 ;
- Draft Perjanjian Kinerja Tahun 2021; dan
- Indikator Kinerja Utama (IKU)

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

---

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2016-2021 Dinas PPKB Kota Binjai disusun berdasarkan RPJMD Kota Binjai tahun 2016-2021. Didalam RPJMD Kota Binjai terdapat Visi dan Misi dari Walikota Terpilih periode 2016-2021, yang kemudian menjadi pedoman penyusunan Renstra tersebut yang kemudian dijabarkan dengan adanya Laporan Kinerja (LK) setiap Tahun selama 5 (lima) tahun.

#### **I. PERNYATAAN VISI**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Instansi Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan cinta yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai dengan Renstra Dinas PP dan KB Kota Binjai tahun 2016-2021 yang berpedoman pada RPJMD Kota Binjai tahun 2016-2021 didalamnya telah ditetapkan Visi dan Misi Walikota terpilih. Visi Walikota Binjai adalah : **"Terwujudnya kota cerdas yang layak huni, berdaya saing dan berwawasan lingkungan menuju Binjai yang sejahtera"**. Kemudian ditetapkanlah **Visi Dinas PPKB** yaitu :

*"Penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas menuju Binjai yang sejahtera."*

#### **II. PERNYATAAN MISI**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan Visi yang ditetapkan. Dengan kata lain Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Agar tujuan dan sasaran tersebut dapat terwujud dan berhasil dengan baik, diharapkan kepada aparatur dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah kotanya dan mengetahui fungsi pokok setiap program-programnya untuk mendapatkan suatu hasil yang akan diperoleh di waktu yang akan datang.

Misi Walikota Binjai adalah :

1. Mewujudkan pemerintah yang cerdas melalui birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang bersih, efisien, demokratis dan terpercaya;
2. Membangun sumber daya manusia berkualitas (**Smart People**) dengan kualifikasi pintar, sehat, produktif dan sejahtera;
3. Mengoptimalkan produktifitas pergerakan masyarakat (**Smart Mobility**) melalui kualitas infra struktur daerah yang mampu meningkatkan fungsi ekonomi, sosial dan budaya;
4. Meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam) berkelanjutan dan pengembangan SDM (Sumber Daya manusia) yang terampil, inovatif, kreatif, produktif (**Smart Economy & Smart Environment**);
5. Meningkatkan kualitas standard hidup (**Smart Living**) dalam aspek kelayakan, kesejahteraan,keadilan dan kenyamanan.

Diantara ke-5 misi Walikota tersebut diatas, maka dapat dilihat bahwa Misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PP dan KB adalah Misi yang kelima yaitu **Smart Living** khususnya dalam hal Kesejahteraan Masyarakat karena bila dikaitkan lagi dengan tujuan, sasaran, program dan Rencana Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang pada dasarnya Program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat melalui Pembinaan kepada "Keluarga".

## **B. TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM**

### **1. TUJUAN**

Tujuan merupakan Penjabaran/ Implementasi dari pernyataan misi, yakni sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan adanya tujuan sebagai penjabaran dari misi, diharapkan akan memberikan cara Operasional Pembangunan kota yang lebih terukur, Obyektif dan Rinci.

Untuk dapat melaksanakan misi Smart Living maka Dinas PP dan KB harus melaksanakan Tujuannya sesuai Fungsinya seperti yang telah jabarkan dalam Renstra DPPKB 2016-2021, maka **tujuan** yang harus dicapai adalah :

1. Penyerasian kebijakan pengendalian penduduk;
2. Pemenuhan hak-hak Reproduksi dan peningkatan kesehatan reproduksi;
3. Peningkatan kualitas pengelolaan data dan informasi program KKBPK;
4. Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga peserta KB;
5. Pembinaan dan Pengembangan Kampung KB.

### **2. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA**

Sasaran merupakan penjabaran secara detail atau implementasi dari tujuan yang merupakan target yang akan dicapai atau yang dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dan selaras dengan tugas pokok dan fungsi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Adapun yang menjadi sasaran strategis sesuai Tujuan diatas adalah:

1. Kebijakan Pemerintah, yang sinergi dan harmonis antara pembangunan Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana terhadap bidang pembangunan lainnya, khususnya untuk kota Binjai;
2. Sarana dan Prasarana, yang memadai untuk Pelayanan Keluarga Berencana;
3. Remaja, sebagai sasaran Pembinaan dan Konseling menjadi Generasi Berencana;

4. Data dan Informasi, dalam hal acuan penetapan sasaran guna mendukung Pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana yang berkualitas, akurat, dan tepat waktu;
5. Masyarakat, khususnya PUS (Pasangan Usia Subur) sebagai sasaran pelaksanaan kegiatan KIE dan Advokasi tentang Pentingnya Program KBPK serta kelompok Kegiatan (POKTAN) untuk Pembinaan Keluarga Sejahtera oleh Kader KB;
6. Kampung KB, sebagai lokus pelaksanaan dan Pembinaan masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah sesuatu untuk mengukur keberhasilan tercapainya sasaran strategis tersebut. Yang menjadi Indikator keberhasilan Program KB pada Instansi Dinas PPKB Kota Binjai sesuai dengan IKU (Indikator Kinerja Utama) adalah sebagai Berikut :

1. TFR ( Total ertility Rate ) atau angka kelahiran Total
2. CPR ( Contracepsi Prevalensi Rate ) atau persentase Pemakaian Kontrasepsi
3. UKP (Usia Kawin Pertama) bagi Wanita
4. LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk)

Dalam hal ini dapat dilihat adanya hubungan antara visi, misi, sasaran strategis dan indikator kinerja. Untuk melihat keterkaitannya dapat dilihat pada tabel II.1 dan hubungan antara sasaran, indikator dan Program ada pada tabel II.2 dibawah ini :







### **C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Perjanjian Kinerja merupakan Perjanjian tertulis dan merupakan dokumen resmi antara kepala daerah selaku pimpinan otonomi pemerintahan di daerah dengan kepala OPD dari semua instansi yang ada di daerah tersebut, dimana dalam perjanjian tersebut menyatakan kesanggupan kepala OPD untuk bertanggung jawab untuk semua program dan kegiatan yang menjadi kewenangan instansinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD masing-masing.

Selain perjanjian antara kepala daerah dengan kepala/ pimpinan OPD didalam perjanjian kinerja tersebut terdapat pula perjanjian antara kepala OPD dengan masing-masing kepala bidang yang dibawahnya atas program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing bidang tersebut.

Didalam perjanjian kinerja berisikan ikrar janji yang ditandatangani antara kepala daerah dengan kepala OPD atau antara kepala OPD dengan Kepala Bidang yang dibawahnya untuk mewujudkan target kinerja yang menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing, dimana keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab bagi yang berjanji. Sedangkan kepala daerah dalam perjanjian tersebut adalah sebagai pihak yang melakukan supervise guna mengevaluasi capaian kinerja dari perjanjian tersebut, bila perlu dapat diambil tindakan dalam rangka pemberian penghargaan maupun sanksi.

Perjanjian kinerja Dinas KB dan PP Kota Binjai tahun 2020 dapat dilihat pada lampiran di halaman akhir.

## **B A B III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

---

#### **i. CAPAIAN KINERJA DINAS PP DAN KB KOTA BINJAI.**

##### **1. TARGET DAN REALISASI KINERJA DPPKB 2011 - 2015**

Capaian Kinerja merupakan perbandingan dari target dengan realisasi dari suatu program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD DPPKB dalam satu tahun. Program / kegiatan yang dilaksanakan bersumber dari indikator kinerja sasaran. Bila realisasi pelaksanaan program yang bersumber dari indikator kinerja nya baik , maka baik pula lah capaian kinerjanya.

Untuk Mengukur Capaian Kinerja RENSTRA DPPKB Kota Binjai dapat dilihat dengan membandingkan antara Capaian Kinerja Renstra Periode sebelumnya dengan target capaian periode Renstra saat ini (2016-2021). Capaian Kinerja Tahun 2011 -2015 dapat dilihat pada Tabel III.A.1 dibawah ini











## **2. TARGET CAPAIAN KINERJA DPPKB 2016 – 2021**

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja / Perjanjian Kinerja Tahun 2019 (*performance plan*) yang diinginkan, dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai oleh DPPKB Kota Binjai pada tahun sebelumnya.

Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Metode ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak - pihak internal maupun eksternal tentang sejauh mana target / pelaksanaan visi dan misi Walikota Kota Binjai untuk tahun 2016-2021. Hal ini dapat kita lihat pada tabel III.A.2 berikut ini.











### **3. CAPAIAN KINERJA DPPKB TAHUN 2019 DAN 2020**

Untuk menganalisis Capaian Kinerja selama 1 (satu) tahun ini (2020) , kita dapat membandingkan antara capaian sasaran di tahun 2019 dengan capaian sasaran di tahun 2020.

Target dan Realisasi Kinerja 2020 dan Capaian Kinerja Tahun 2019 - 2020 dapat kita lihat pada tabel III.A.3 dibawah ini







## **ii. ANALISIS CAPAIAN KINERJA DPPKB 2020**

Setelah melihat Capaian Target Kinerja DPPKB Kota Binjai Tahun 2020 diatas dapat dilihat kesesuaian dengan sasaran Strategis pada Renstra DPPKB dan RPJMD Kota Binjai tahun 2016 -2021.

Lalu untuk lebih mendetail lagi dapat kita lihat kesesuaian antara indikator kinerja DPPKB Kota Binjai dengan Target dan Realisasi Kegiatan Di tahun 2020. Hal ini untuk memperjelas tentang akuntabilitas kinerja DPPKB di tahun 2020. Analisis Capaian Kinerja DPPKB Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel III.B di bawah ini







Dari data tabel diatas dapat dilihat Indikator Kinerja Dinas PPKB Kota Binjai adalah :

angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) diperkirakan 2.21% anak per wanita usia reproduksi. Rincian kondisi umum dari penyelenggaraan urusan keluarga berencana di Kota Binjai adalah sebagai berikut: Tingkat kesertaan ber KB diukur dari angka persentase PUS (Pasangan usia subur) yang menjadi peserta KB, jumlah peserta KB 2900 peserta dari yang ditargetkan sebanyak 4000 orang dan jumlah PUS diperkirakan sebanyak 2997 pasangan dari yang ditargetkan sebanyak 4034 pasangan, sehingga tingkat kesertaan ber KB dari seluruh PUS sebesar 74,29 %.

CPR /Persentase Pemakaian Kontrasepsi dari target sebesar 1,22 % dapat terrealisasi sebesar 1,43%. Capaian Presentase 1,43% yang artinya telah tercapai melebihi target yang ditentukan dan faktor pendorong tercapainya target adalah telah dilaksanakannya program KB khususnya pemakaian Kontrasepsi jangka panjang (MKJP).

Rasio Akseptor KB dari target sebesar 75 % dapat terealisasi sebesar 74,29%. Capaian persentase 74,29% yang artinya tercapai hampir sesuai target, adapun faktor pendorong tercapainya hampir sesuai terget ini karena KB sudah merupakan kebutuhan masyarakat di Kota Binjai.

### **iii. AKUNTABILITAS KEUANGAN DPPKB 2020**

#### **1. Kendala / Hambatan Pencapaian Target Tahun 2020**

Dalam pencapaian target Kinerja di Tahun 2020 ada beberapa kendala / hambatan yang dihadapi Dinas KB dan PP Kota Binjai, antara lain :

1.1 Untuk sistem aplikasi yang belum final, kendalanya adalah dalam perencanaan kegiatan DAK FISIK lewat e-planing dimana Dinas PPKB harus meminta izin untuk log in dan log out melalui Bappeda dalam menyampaikan usulan DAK FISIK via aplikasi KRISNA, sehingga Dinas PPKB tidak dapat merubah dengan cepat apabila ada perubahan yang dianggap penting. sesuai dengan yang di butuhkan oleh Dinas PPKB, selain itu banyak persyaratan lain untuk memasukkan usulan lewat Aplikasi KRISNA tersebut, antara lain harus adanya KAK (Kerangka Acuan Kegiatan) untuk tiap kegiatan yang diusulkan dan dokumen lain dalam bentuk PDF, sehingga kadang bidang Program sedikit kewalahan dalam pengusulan DAK FISIK.

Belum lagi dalam hal Perencanaan pada Renja RKPD dan Renja OPD yang harus diinput melalui Aplikasi eRa sedangkan untuk pembuatan RKA tetap melalui Aplikasi SIMDA. Bagian Program kadang harus dua kali menginput.

1.2 Mengenai DAK BOKB, kendalanya adalah pembatasan unit cost dalam perencanaan, sehingga kadang ada kegiatan yang dananya kurang tapi ada juga kegiatan yang dananya berlebih, contohnya unit cost biaya langganan listrik yang besar sementara untuk internet dibatasi, sehingga untuk beberapa kegiatan tidak dapat terealisasi dengan baik.

## **2. Keadaan Tahun 2020, Program Anggaran, Realisasi dan Capaian (%)**

Pada Dinas PP dan KB Kota Binjai ada dua Anggaran yang diterima yaitu Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Anggaran Belanja Langsung. Dalam hal ini Anggaran Belanja Tidak Langsung terdiri dari tunjangan tidak langsung Gaji dan tunjangan tidak langsung Non Gaji. Tunjangan tidak langsung gaji terdiri antara lain : tunjangan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional dan sebagainya. Sedangkan tunjangan tidak langsung Non Gaji adalah Tunjangan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja /TPP atau disebut juga dengan Uang Kesejahteraan.

Untuk Akuntabilitas Keuangan di Tahun 2020 terjadi empat kali penginputan kegiatan, yang mana diawal keluar DPA APBD sebesar Rp. 1.832.955.693,00 (Satu milyar delapan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan Kemudian di MP (Mendahului Perubahan ) APBD mengalami penurunan karena adanya kondisi Pandemi Corona Virus (COVID 19) menyebabkan anggaran mengalami refocussing pertama menjadi sejumlah Rp. 1.455.433.686,00 (Satu milyar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) kemudian baru dimasukkan kegiatan DAK ( Fisik maupun Non Fisik) sejumlah Rp. 976.736.000,00 ( Sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) untuk DAK FISIK dan Rp.1.413.456.000,00 (Satu milyar empat ratus tiga belas juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk DAK Non Fisik/BOKB dengan

total Rp.2.390.192.000,00 ( Dua milyar tiga ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sehingga pagu anggaran bertambah mejadi sejumlah Rp. 3.199.342.258,00 (Tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) dan setelah itu baru mengalami penambahan anggaran pada MP 2 (Mendahului P APBD tahap 2) sejumlah Rp. 13.340.000,00 (Tiga belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga ada 4 (empat) buah DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) selama Tahun 2020. Dengan total jumlah anggaran keseluruhan untuk belanja Langsung sebesar Rp.3.212.682.258,00 (Tiga milyar dua ratus dua belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).

Dibanding dengan Tahun 2019 yang sebesar Rp.3.545.738.600,00 (Tiga milyar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) untuk dana APBD ada penurunan di tahun 2020 yakni sebesar Rp. 333.056.342,00 ( Tiga ratus tiga puluh tiga juta lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah). Pendanaan tersebut diperuntukkan bagi 4 (empat ) bidang, 11 (sebelas) program dan 39 (Tiga puluh sembilan) Kegiatan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan 14 (empat belas) kegiatan dengan Dana Alokasi Khusus DAK BOKB / DAK Non Fisik .

Untuk Anggaran Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Non Gaji) ada juga perubahan / penurunan Anggaran di tahun 2020 dibanding Thn 2019 yakni sebesar Rp.1.072.670.843,00 (Satu milyar tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), dimana di Tahun 2019 sejumlah Rp. 5.659.180.541,00 (Lima milyar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) menjadi Rp.4.586.509.698,00 (empat milyar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus sembilan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) di tahun 2020, hal ini dikarenakan efisiensi anggaran.

Pada akhir tahun 2020 Realisasi keuangan ini mencapai :

	<b>Dana</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
1. Blj Tdk Lngsng	Rp. 4.586.509.698,-	Rp. 3.690.083.004,00.-	80,45 %
2. Belj Lngsng	Rp. 3.212.682.258,-	Rp. 3.038.051.110,00.-	94,56 %

Dengan rincian belanja langsung sebagai berikut :

Tabel III.c  
Realisasi Keuangan Belanja Langsung Dinas PPKB Tahun 2020

<b>No</b>	<b>Bidang dan Program</b>	<b>Jlh Keg.</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Cap %</b>
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8	350.116.255	328.460.735	93,81
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5	121.749.000	121.667.379	99,93
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	0	0	0,00
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	0	0	0,00
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	5.000.050	5.000.050	100
6.	Program Keluarga Berencana	15	1.048.260.290	1.041.904.010	99,39

---

7.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	4	23.790.050	23.619.050	99,28
9.	Program Pelayanan Kontrasepsi	3	41.959.490	41.959.490	100
10.	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	6	1.506.570.900	1.361.871.328	90,39
11.	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	2	0	0	0,00
12.	Program Pendalian Penduduk	6	115.236.223	113.569.068	98,55
<b>JUMLAH</b>			<b>3.212.682.258</b>	<b>3.038.051.110</b>	<b>94,56</b>

## **B A B I V** **P E N U T U P**

---

### **A. Kesimpulan**

Dapat disimpulkan bahwa dalam Laporan Kinerja (LK) Tahun 2020 ini memuat laporan pertanggung jawaban pelaksana tugas pokok dan fungsi dari Dinas PP dan KB Kota Binjai dalam pengelolaan sumber daya, baik berupa dana, sarana, tenaga dan lain-lain selama 1 (satu) tahun ini dari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dapat dilihat disini bahwa capaian kinerja Dinas PP dan KB Kota Binjai mendapatkan hasil yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan Persentase Realisasi penyerapan Keuangan Belanja Langsung sebesar 97,35% dan Realisasi Fisik 100,00%.

Ditinjau dari aspek Internal, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, serta diharapkan mampu mendorong etos kerja seluruh personil baik secara individu maupun sebagai bagian Team Work agar menjadi lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Selain itu Laporan Kinerja ini juga diharapkan mampu berperan sebagai pendorong terwujudnya Good Governance dalam arti luas, dan berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik dalam mendukung pencapaian KB sehingga terwujudnya Penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas menuju Binjai yang sejahtera mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

### **B. Saran-saran**

Walaupun Program dan Kegiatan DPPKB T.A 2020 telah sesuai dengan Indikator kinerja RPJMD dan capaian kinerja mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan, tetapi masih perlu ditingkatkan lagi, karena kita tidak boleh selalu berpuas diri dengan hasil yang didapat, tetapi untuk di masa yang akan datang diharapkan agar Dinas PP dan KB dapat terus mengoptimalkan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya. Dan tetap harus sejalan dengan Renstra DPPKB 2016 – 2021 yang berpedoman pada RPJMD Kota Binjai 2016-2021 pula.

Diharapkan pula bantuan dan kerjasamanya dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya untuk dapat melaksanakan kegiatan yang memang berkaitan satu dengan yang lainnya khususnya yang berhubungan dengan program KBPK dan Pembinaan kampung KB. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Binjai, Januari 2021

**KEPALA DINAS PP DAN KB  
KOTA BINJAI**



**Drg. Lili OSDEWATI, M.Kes  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19630725 1989**

## **LAMPIRAN- LAMPIRAN**

- **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**
- **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**





**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK**

No.	Tujuan	Sasaran
1	2	3
1	Mewujudkan keseimbangan kebijakan kependudukan guna mendorong terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan, dengan kualitas standard hidup dalam aspek kelayakan kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan	Tersedianya Landasan hukum dan kebijakan yang sinergi dan harmonis antara pembangunan Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana terhadap bidang pembangunan lainnya, khususnya untuk kota Binjai.
2	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB, guna tercapainya target pencapaian maksimal demi keberhasilan pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan program KB	<p>Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai untuk Pelayanan Keluarga Berencana</p> <p>Meningkatnya PUS (Pasangan Usia Subur) yang memahami tentang Alat Kontrasepsi Modern</p> <p>Meningkatnya Angka Pemakaian Kontrasepsi</p> <p>Turunnya Angka Kelahiran Total</p> <p>Meningkatnya Jumlah Peserta KB baru</p> <p>Menurunnya Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin anak tapi tidak ber KB</p> <p>Menurunnya PUS yang istrinya di bawah 20 thn</p> <p>Menurunnya Persentase tingkat putus pakai kontrasepsi</p> <p>Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk</p>

No.	Tujuan	Sasaran
1	2	3

3	Meningkatkan Pengetahuan Remaja tentang Kesehatan Reproduksi dan Generasi Berencana (GenRe)	<p>Terlaksananya Pembinaan dan Konseling bagi Remaja</p> <p>Menurunnya angka kelahiran remaja perempuan usia 15-19</p> <p>Meningkatnya jumlah kelompok PIK-R</p>
4	Meningkatkan pembinaan Keluarga di masyarakat demi terwujudnya Keluarga Sejahtera Bahagia	<p>Terlaksananya Pembinaan Keluarga Sejahtera oleh Kader pada kelompok Kegiatan (POKTAN)</p> <p>Meningkatnya jumlah kelompok BKB, BKR dan BKL</p> <p>Meningkatnya jumlah kelompok UPPKS</p> <p>Tersedianya PPKS (Pusat Pembinaan Keluarga Sejahtera) di setiap kecamatan</p> <p>Meningkatnya jumlah anggota Kelompok BKB, BKR dan BKL yang ber KB</p> <p>Meningkatnya jumlah anggota UPPKS yang berKB</p>

No.	Tujuan	Sasaran
1	2	3
5	Meningkatkan Advokasi dan KIE kepada masyarakat tentang pentingnya pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.	<p>Persentase Pengetahuan masyarakat tentang Program KKBPK ( Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)</p> <p>Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana yang akurat, tepat waktu serta pemanfaatan data dan informasi tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan</p>

		Meningkatnya OPD yang bekerjasama aktif dalam Pembangunan di kampung KB
--	--	---

## ◀ DAN KELUARGA BERENCANA

Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
4	5
Peraturan Daerah dan / Perwa tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan dan tentang Keluarga Berencana	Peraturan Perundang-undangan Daerah
Persentase Faskes dan Jejaring yang bekerjasama dengan BPJS dalam melayani pemasangan kontrasepsi dan terintegrasi dengan DPPKB Kota Binjai	Laporan Monev pendistribusian Alokasi
Persentase Penggunaan kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)/ Peserta KB Aktif (PA) MKJP	Laporan Buku Umpan Balik PA dan laporan Pelaksanaan MOP dan MOW
Persentase CPR	Laporan hasil Evaluasi dan buku Umpan balik
Persentase TFR	Laporan hasil Evaluasi dan buku Umpan balik
Jumlah Peserta KB Baru (PB)	Laporan hasil Evaluasi dan buku Umpan balik
Persentase PUS Unmetneed	Laporan hasil Evaluasi dan buku Umpan balik
PUS (Pasangan Usia subur) yang istrinya dibawah 20 thn	Laporan hasil Evaluasi dan buku Umpan balik
Persentase angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) Kontrasepsi)	Laporan hasil Evaluasi dan buku Umpan balik
Persentase LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk)	Laporan hasil Evaluasi dan buku Umpan balik

Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
4	5

Usia Kawin Pertama (UKP) bagi wanita (tahun)	Laporan Pembinaan Catin (Calon Pengantin)
Angka Kelahiran Remaja Perempuan per 1000 perempuan usia 15 -19 tahun	Laporan hasil Evaluasi dan buku Umpan balik
Cakupan jumlah Remaja yang Ikut Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)	Laporan Kegiatan dan buku Umpan balik
Persentase Pemahaman Orang tua, Anak, Remaja dan/ anggota Keluarga tentang fungsi keluarga	Laporan Kegiatan
Cakupan Jumlah Kelompok BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja) dan BKR (Bina Keluarga Lansia)	Laporan Kegiatan dan buku Umpan balik
Cakupan Jumlah kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS)	Laporan Kegiatan dan buku Umpan balik
PPKS di setiap Kecamatan	Pelaksanaan Pembinaan Catin
Cakupan Anggota BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja) dan BKR (Bina Keluarga Lansia) yang ber- KB	Laporan Kegiatan dan buku Umpan balik
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS)	Laporan Kegiatan dan buku Umpan balik

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Sumber Data</b>
4	5
Persentase Pemahaman Orang tua, Anak, Remaja dan/ anggota Keluarga tentang pentingnya Pengendalian Penduduk dan KB.	Laporan Kegiatan
Data Keluarga	Laporan F//KAB-DAL, Laporan F//KB, Laporan F//PK/16, REK.KAB.F//PK/15, Laporan F//KEC/DAL

Jumlah OPD terkait yang bekerjasama aktif dengan Dinas PPKB dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program KKBPK khususnya di kampung KB

Laporan Kegiatan

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai

Drg. Lilik Rosdewati, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630725 198902 2 001

11	Terlaksananya Pembinaan dan Konseling bagi Remaja	Usia Kawin Pertama (UKP) bagi wanita (tahun)	laporan Pembinaan Catin (Calon Pengantin)
12	Menurunnya angka kelahiran remaja perempuan usia 15-19	Angka Kelahiran Remaja Perempuan per 1000 perempuan usia 15 -19 tahun	Laporan hasil Evaluasi dan buku Umpan balik
13	Meningkatnya jumlah kelompok PIK-R	Cakupan jumlah Remaja yang Ikut Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)	Laporan Kegiatan dan buku Umpan balik
14	Terlaksananya Pembinaan Keluarga Sejahtera oleh Kader pada kelompok Kegiatan (POKTAN)	Persentase Pemahaman Orang tua, Anak, Remaja dan/ anggota Keluarga tentang fungsi keluarga	Laporan Kegiatan
15	Meningkatnya jumlah kelompok BKB, BKR dan BKL	Cakupan Jumlah Kelompok BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja) dan BKL (Bina Keluarga Lansia)	Laporan Kegiatan dan buku Umpan balik
16	Meningkatnya jumlah kelompok UPPKS	Cakupan Jumlah kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS)	Laporan Kegiatan dan buku Umpan balik
17	Tersedianya PPKS (Pusat Pembinaan Keluarga Sejahtera) di setiap kecamatan	PPKS di setiap Kecamatan	Pelaksanaan Pembinaan Catin
18	Meningkatnya jumlah anggota Kelompok BKB, BKR dan BKL yang ber KB	Cakupan Anggota BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja) dan BKL (Bina Keluarga Lansia) yang ber-KB	Laporan Kegiatan dan buku Umpan balik
19	Meningkatnya jumlah anggota UPPKS yang berKB	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS)	Laporan Kegiatan dan buku Umpan balik
20	Persentase Pengetahuan masyarakat tentang Program KKBPK ( Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	Persentase Pemahaman Orang tua, Anak, Remaja dan/ anggota Keluarga tentang pentingnya Pengendalian Penduduk dan KB.	Laporan Kegiatan
21	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana yang akurat, tepat waktu serta pemanfaatan data dan informasi tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan	Data Keluarga	Laporan F//KAB-DAL, Laporan F//KB, Laporan F//PK/16, REK.KAB.F//PK/15, Laporan F//KEC/DAL
22	Meningkatnya OPD yang bekerjasama aktif dalam Pembangunan di kampung KB	Jumlah OPD terkait yang bekerjasama aktif dengan Dinas PPKB dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program KKBPK khususnya di kampung KB	Laporan Kegiatan



Ketua Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai

Drg. Lili Rosdewati, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630725 198902 2 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drg. Lilik Rosdewati, M.Kes

Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. M. Idaham, SH, M. Si

Jabatan : Walikota Binjai

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

*Pihak pertama* berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

*Pihak kedua* akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, 11 Januari 2021

Pihak Kedua  
WALIKOTA BINJAI  
  
H. M. Idaham, SH, M. Si

Pihak Pertama  
Ka. Dinas PPKB Kota Binjai  
  
Drg. Lilik Rosdewati, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP.19630725198902 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI**

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Landasan hukum dan kebijakan yang sinergi dan harmonis antara pembangunan Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana terhadap bidang pembangunan lainnya, khususnya untuk kota Binjai.	Peraturan Daerah dan / Perwa tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan dan tentang Keluarga Berencana	1 perwa
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai untuk Pelayanan Keluarga Berencana	Persentase Faskes dan Jejaring yang bekerjasama dengan BPJS dalam melayani pemasangan kontrasepsi dan terintegrasi dengan DPPKB Kota Binjai	42 Faskes
3	Meningkatnya PUS (Pasangan Usia Subur) yang memahami tentang Alat Kontrasepsi Modern	Capaian Penggunaan kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)/ Peserta KB Aktif (PA) MKJP	44.239 peserta
4	Meningkatnya Angka Pemakaian Kontrasepsi	Persentase CPR	74,75 %
5	Turunnya Angka Kelahiran Total	Persentase TFR	2,20 %
6	Meningkatnya Jumlah Peserta KB baru	Jumlah Peserta KB Baru (PB)	80 %
7	Menurunnya Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin anak tapi tidak ber KB	Persentase PUS Unmetneed	9,85 %
8	Menurunnya PUS yang istrinya di bawah 20 thn	PUS (Pasangan Usia subur) yang istrinya dibawah 20 thn	323 org
9	Menurunnya Persentase tingkat putus pakai kontrasepsi	Persentase angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) Kontrasepsi)	15 %
10	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk)	1,21 %
11	Terlaksananya Pembinaan dan Konseling bagi Remaja	Usia Kawin Pertama (UKP) bagi wanita (tahun)	21 thn
12	Menurunnya angka kelahiran remaja perempuan usia 15-19	Angka Kelahiran Remaja Perempuan per 1000 perempuan usia 15 -19 tahun	23 %
13	Meningkatnya jumlah kelompok PIK-R	Cakupan jumlah Remaja yang ikut Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)	66 klmpk
14	Terlaksananya Pembinaan Keluarga Sejahtera oleh Kader pada kelompok Kegiatan (POKTAN)	Persentase Pemahaman Orang tua, Anak, Remaja dan/ anggota Keluarga tentang fungsi keluarga	1 keg
15	Meningkatnya jumlah kelompok BKB, BKR dan BKL	Cakupan Jumlah Kelompok BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja) dan BKR (Bina Keluarga Lansia)	5000 org

16	Meningkatnya jumlah kelompok UPPKS	Cakupan Jumlah anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS)	41 klmpk
17	Tersedianya PPKS (Pusat Pembinaan Keluarga Sejahtera) di setiap kecamatan	PPKS di setiap Kecamatan	1 klmpk
18	Meningkatnya jumlah anggota Kelompok BKB, BKR dan BKL yang ber KB	Cakupan Anggota BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja) dan BKL (Bina Keluarga Lansia) yang ber- KB	2000 org
19	Meningkatnya jumlah anggota UPPKS yang berKB	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS)	400 PUS
20	Persentase Pengetahuan masyarakat tentang Program KKBPK ( Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	Persentase Pemahaman Orang tua, Anak, Remaja dan/ anggota Keluarga tentang pentingnya Pengendalian Penduduk dan KB.	60 %
21	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana yang akurat, tepat waktu serta pemanfaatan data dan informasi tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan	Data Pencapaian Program KB	720 buku/thn
22	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Advokasi KIE melalui Pemutaran Film MUPEN KB	Frekwensi Pemutaran Film Melalui MUPEN KB	37 Kel
23	Meningkatnya OPD yang bekerjasama aktif dalam Pembangunan di kampung KB	Jumlah OPD terkait yang bekerjasama aktif dengan Dinas PPKB dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program KKBPK khususnya di kampung KB	15 OPD

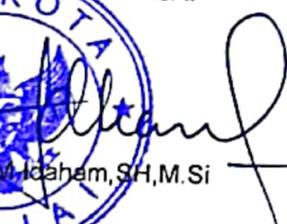
Kegiatan	Anggaran
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 9.613.700,-
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Rp. 5.336.500,-
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.848.370.031,-
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp. 133.350.000,-
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 5.651.600,-
6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 7.130.000,-
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 85.747.600,-
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 31.793.600,-
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 103.212.000,-
10. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 200.000.000,-
11. Pengadaan Mebel	Rp 30.000.000,-
12. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 69.919.716,-
13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 183.367.400,-
14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 59.534.000,-

15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	209.974.800,-
16. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	33.230.000,-
17. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	407.637.000,-
18. Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Rp.	15.959.500,-
19. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Rp.	27.995.450,-
20. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Rp.	43.917.100,-
21. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Rp.	148.421.300,-
22. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Rp.	132.533.000,-
23. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Rp.	370.500.000,-
24. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Rp.	177.600.000,-
25. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Rp.	76.482.000,-
26. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Rp.	282.529.000,-
27. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Rp.	184.800.000,-
28. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi	Rp.	23.100.000,-
29. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Rp.	274.760.000,-
30. Peningkatan Kesertaan KB Pria	Rp.	14.520.000,-
31. Pembinaan Terpadu Kampung KB	Rp.	256.760.000,-
32. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga	Rp.	63.439.800,-

33. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Komasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK – R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Rp. 240.484.700,-
34. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Rp. 189.703.300,-
<b>Jumlah Total</b>	<b>Rp. 8.947.373.097,-</b>

Binjai, 14 Januari 2021

WALIKOTA BINJAI



H. M. Idahem, SH, M. Si



Kepala Dinas PP dan KB  
Kota Binjai

Drg. Lilik Rosdewati, M. Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630725 198902 2 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Budi Kustoyo

Jabatan : Kabid. Pengendalian Penduduk Advokasi dan Informasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drg. Lilik Rosdewati, M.Kes

Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

*Pihak pertama* berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

*Pihak kedua* akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, 12 Januari 2021

Pihak Kedua  
Ka.Dinas PPKB Kota Binjai

Drg. Lilik Rosdewati, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP.19630725198902 2 001

Pihak Pertama  
Kabid. Pengendalian  
Penduduk Advin.

Drs. Budi Kustoyo  
Pembina  
NIP. 19631206 199203 1 002

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

### BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK ADVOKASI DAN INFORMASI

#### DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Landasan hukum dan kebijakan yang sinergi dan harmonis antara pembangunan Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana terhadap bidang pembangunan lainnya, khususnya untuk kota Binjai.	Peraturan Daerah dan / Perwa tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan dan tentang Keluarga Berencana	1 perwa
2	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk)	1,21 %
3	Persentase Pengetahuan masyarakat tentang Program KKBPK ( Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	Persentase Pemahaman Orang tua, Anak, Remaja dan/ anggota Keluarga tentang pentingnya Pengendalian Penduduk dan KB.	60 %
4	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana yang akurat, tepat waktu serta pemanfaatan data dan informasi tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan	Data Pencapaian Program KB	720 buku/thn
5	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Advokasi KIE melalui Pemutaran Film MUPEN KB	Frekuensi Pemutaran Film	37 Kel
6	Meningkatnya OPD yang bekerjasama aktif dalam Pembangunan di kampung KB	Jumlah OPD terkait yang bekerjasama aktif dengan Dinas PPKB dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program KKBPK khususnya di kampung KB	15 OPD

Kegiatan	Anggaran
1. Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Rp. 15.959.500,-
2. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Rp. 27.995.450,-
3. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Rp. 43.917.100,-
4. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Rp. 148.421.300,-
<b>Jumlah Total</b>	<b>Rp. 236.293.350,-</b>

Binjai, 12 Januari 2021

Kepala Dinas PP dan KB  
Kota Binjai



Drg. Lilik Rosdewati, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP.19630725 198902 2 001

Kabid Dalduk dan Advin  
Dinas PP dan KB Kota Binjai



Drs. Budi Kustoyo  
Pembina  
NIP.19631206 199203 1 002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kasmi, S.sos

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drg. Lilik Rosdewati, M.Kes

Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

*Pihak pertama* berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

*Pihak kedua* akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, 12 Januari 2021

Pihak Kedua  
Ka.Dinas PPKB Kota Binjai

Drg. Lilik Rosdewati, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP.19630725198902 2 001

Pihak Pertama  
Sekretaris

Kasmi, S.sos  
Pembina  
NIP. 19680402199003 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BIDANG SEKRETARIAT

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Landasan hukum dan kebijakan yang sinergi dan harmonis antara pembangunan Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana terhadap bidang pembangunan lainnya, khususnya untuk kota Binjai.	Peraturan Daerah dan / Perwa tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan dan tentang Keluarga Berencana	1 perwa
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai untuk Pelayanan Keluarga Berencana	Persentase Faskes dan Jejaring yang bekerjasama dengan BPJS dalam melayani pemasangan kontrasepsi dan terintegrasi dengan DPPKB Kota Binjai	45 Faskes
3	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana yang akurat, tepat waktu serta pemanfaatan data dan informasi tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan	Data Pencapaian Program KB	720 buku/thn
4	Meningkatnya OPD yang bekerjasama aktif dalam Pembangunan di kampung KB	Jumlah OPD terkait yang bekerjasama aktif dengan Dinas PPKB dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program KKBPK khususnya di kampung KB	15 OPD

Kegiatan	Anggaran
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 9.613.700,-
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Rp. 5.336.500,-
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.848.370.031,-
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp. 133.350.000,-
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 5.651.600,-
6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 7.130.000,-
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 85.747.600,-
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 31.793.600,-
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 103.212.000,-
10. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 200.000.000,-
11. Pengadaan Mebel	Rp 30.000.000,-
12. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 69.919.716,-
13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 183.367.400,-

14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 59.534.000,-
15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 209.974.800,-
16. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 33.230.000,-
17. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 407.637.000,-
Jumlah Total	Rp. 6.423.867.947,-

Binjai, 12 Januari 2021

Kepala Dinas PP dan KB  
Kota Binjai



Drg. Lilik Rosdewati, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP.19630725 198902 2 001

Sekretaris



Kasmi, S.sos  
Pembina  
NIP. 19680402 199003 2 002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Neri Arisuma, S. STP, M. Hum

Jabatan : Kabid. Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drg. Lilik Rosdewati, M. Kes

Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

*Pihak pertama* berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

*Pihak kedua* akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, 12 Januari 2021

Pihak Kedua  
Ka.Dinas PPKB Kota Binjai

Drg. Lilik Rosdewati, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP.19630725198902 2 001

Pihak Pertama  
Kabid. Keluarga Berencana

Neri Arisuma S,STP,M.Hum  
Pembina  
NIP. 19850113 200302 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

**BIDANG KELUARGA BERENCANA**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI**

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai untuk Pelayanan Keluarga Berencana	Persentase Faskes dan Jejaring yang bekerjasama dengan BPJS dalam melayani pemasangan kontrasepsi dan terintegrasi dengan DPPKB Kota Binjai	45 Faskes
2	Meningkatnya PUS (Pasangan Usia Subur) yang memahami tentang Alat Kontrasepsi Modern	Persentase Penggunaan kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)/ Peserta KB Aktif (PA) MKJP	44.239 peserta
3	Meningkatnya Angka Pemakaian Kontrasepsi	Persentase CPR	74,75 %
4	Turunnya Angka Kelahiran Total	Persentase TFR	2,20 %
5	Meningkatnya Jumlah Peserta KB baru	Jumlah Peserta KB Baru (PB)	80 %
6	Menurunnya Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin anak tapi tidak ber KB	Persentase PUS Unmetneed	9,85 %
7	Menurunnya PUS yang istrinya di bawah 20 thn	PUS (Pasangan Usia subur) yang istrinya dibawah 20 thn	323 org
8	Menurunnya Persentase tingkat putus pakai kontrasepsi	Persentase angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) Kontrasepsi)	15 %

Kegiatan	Anggaran
1. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Rp. 132.533.000,-
2. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Rp. 370.500.000,-
3. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Rp. 177.600.000,-
4. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Rp. 76.482.000,-
5. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Rp. 282.529.000,-
6. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Rp. 184.800.000,-
7. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Rp. 23.100.000,-
8. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Rp. 274.760.000,-

9. Peningkatan Kesertaan KB Pria

Rp. 14.520.000,-

10. Pembinaan Terpadu Kampung KB

Rp. 256.760.000,-

Jumlah Total

Rp. 1.793.584.000,-

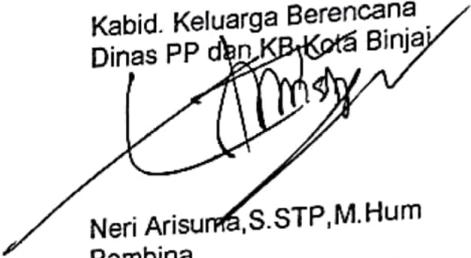
Kepala Dinas PP dan KB  
Kota Binjai



Drg. Lilik Rosdewati, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP.19630725 198902 2 001

Binjai, 12 Januari 2021

Kabid. Keluarga Berencana  
Dinas PP dan KB Kota Binjai



Neri Arisuma, S.STP, M.Hum  
Pembina  
NIP. 19850113 200312 2 002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Ismawaty, SH  
Jabatan : Plt. Kabid. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (K3)  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drg. Lilik Rosdewati, M.Kes  
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

*Pihak pertama* berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

*Pihak kedua* akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, 12 Januari 2021

Pihak Kedua  
Ka.Dinas PPKB Kota Binjai

Drg. Lilik Rosdewati, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP.19630725198902 2 001

Pihak Pertama  
Plt. Kabid. Ketahanan dan  
Kesejahteraan Keluarga

Sri Ismawaty, SH  
Pembina  
NIP. 19680925 199312 2 001

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

### BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

#### DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BINJAI

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pembinaan dan Konseling bagi Remaja	Usia Kawin Pertama (UKP) bagi wanita (tahun)	21 thn
2	Menurunnya angka kelahiran remaja perempuan usia 15-19	Angka Kelahiran Remaja Perempuan per 1000 perempuan usia 15 -19 tahun	23 %
3	Meningkatnya jumlah kelompok PIK-R	Cakupan jumlah Remaja yang Ikut Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)	66 klmpk
4	Terlaksananya Pembinaan Keluarga Sejahtera oleh Kader pada kelompok Kegiatan (POKTAN)	Persentase Pemahaman Orang tua, Anak, Remaja dan/ anggota Keluarga tentang fungsi keluarga	1 keg
5	Meningkatnya jumlah kelompok BKB, BKR dan BKL	Cakupan Jumlah Kelompok BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja) dan BKR (Bina Keluarga Lansia)	5000 org
6	Meningkatnya jumlah kelompok UPPKS	Cakupan Jumlah anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS)	41 klmpk
7	Tersedianya PPKS (Pusat Pembinaan Keluarga Sejahtera) di setiap kecamatan	PPKS di setiap Kecamatan	1 klmpk
8	Meningkatnya jumlah anggota Kelompok BKB, BKR dan BKL yang ber KB	Cakupan Anggota BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja) dan BKR (Bina Keluarga Lansia) yang ber- KB	2000 org
9	Meningkatnya jumlah anggota UPPKS yang berKB	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS)	400 PUS

Kegiatan	Anggaran
1. . Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga	Rp. 63.439.800,-
2. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK – R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Rp. 240.484.700,-
3. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Rp. 189.703.300,-
Jumlah Total	Rp. 493.627.800,-

Binjai, 12 Januari 2021

Kepala Dinas PP dan KB  
Kota Binjai

Plt. Kabid. Ketahanan dan KK  
Dinas PP dan KB Kota Binjai



Drg. Lilik Rosdewati, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP.19630725 198902 2 001



Sri Ismawaty, SH  
Pembina  
NIP. 19680925 199312 2 001

SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	TARGET	REALISASI
Persentase Pengetahuan masyarakat tentang Program KKBPK ( Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	Persentase Pemahaman Orang tua, Anak, Remaja dan/ anggota Keluarga tentang pentingnya Pengendalian Penduduk dan KB.	Program Keluarga Berencana	1 keg	1 keg
Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana yang akurat, tepat waktu serta pemanfaatan data dan informasi tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan	Data Keluarga	Program Keluarga Berencana	720 buku/thn	720 buku/thn
Meningkatnya OPD yang bekerjasama aktif dalam Pembangunan di kampung KB	Jumlah OPD terkait yang bekerjasama aktif dengan Dinas PPKB dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program KKBPK khususnya di kampung KB	Program Keluarga Berencana	10 OPD	10 OPD

<b>Misi 5</b>	<b>: Membina / mengembangkan Kampung KB.</b>	
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatkan Advokasi dan KIE kepada masyarakat tentang pentingnya pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.	<p>Persentase Pengetahuan masyarakat tentang Program KKBPK ( Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)</p> <p>Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana yang akurat, tepat waktu serta pemanfaatan data dan informasi tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan</p> <p>Meningkatnya OPD yang bekerjasama aktif dalam Pembangunan di kampung KB</p>	<p>Persentase Pemahaman Orang tua, Anak, Remaja dan/ anggota Keluarga tentang pentingnya Pengendalian Penduduk dan KB.</p> <p>Data Keluarga</p> <p>Jumlah OPD terkait yang bekerjasama aktif dengan Dinas PPKB dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program KKBPK khususnya di kampung KB</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	Meningkatnya OPD yang bekerjasama aktif dalam Pembangunan di kampung KB	Jumlah OPD terkait yang bekerjasama aktif dengan Dinas PPKB dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program KKBPk khususnya di kampung KB	02	Lomba Keluarga Harmonis		90%	80%	16,454,000.00	16,454,000	100%	14,510,000.00	14,510,000.00	100%	15,961,000	100%	17,557,100	100%	19,312,810			
			03	Lomba IMP		70%	70%	18,486,000.00	18,486,000	100%	20,790,000.00	20,497,400.00	100%	22,547,140	100%	24,801,854	100%	27,282,039			
			04	Pemutaran Film melalui MUPEN KB		70%	80%	32,064,000.00	32,064,000	100%	22,455,000.00	22,205,000.00	100%	24,425,500	100%	26,868,050	100%	29,554,855			
			05	Operasional IMP		80%	80%	110,400,000.00	110,400,000	0%	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	
			06	Orientasi Petugas Pencatatan dan Pelaporan DALLAP		70%	70%	15,071,000.00	15,071,000	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	0%	-	0%	-
			11	Orientasi petugas pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi ( PELKON )		75%	80%	14,778,000.00	14,778,000	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	0%	-	0%	-
			12	Pembinaan Saka Kencana		80%	75%	26,898,000.00	26,898,000	80%	37,656,000.00	37,656,000.00	100%	41,421,600	100%	45,563,760	100%	50,120,136			
			18	Oprasional Balai Penyuluhan KB dan Tim KB		80%	90%	396,050,000.00	321,540,000	0%	-	-	0%	-	0	0%	0	0%	0	0	0
			21	Pembuatan Film Penerangan KB		0%	80%	30,000,000.00	29,700,000	0%	-	-	0%	-	0	0%	0	0%	0	0	0
			22	Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan (DAK BOKB)		0%	0%	-	-	98%	325,000,000.00	307,448,045.00	100%	338,192,850	100%	372,012,134	100%	409,213,348			
			23	Pusat Pembinaan Keluarga Sejahtera (PPKS)		0%	0%	-	-	100%	274,230,300.00	260,150,000.00	100%	286,165,000	100%	314,761,500	100%	346,259,650			
			24	Operasional Distribusi Alokasi (DAK BOKB)		0%	0%	-	-	90%	34,000,000.00	26,250,000.00	100%	28,875,000	100%	31,762,500	100%	34,938,750			
			25	Operasional Penggerakan di Kampung KB (DAK BOKB)		0%	0%	-	-	100%	400,000,000.00	399,800,000.00	100%	439,780,000	100%	483,758,000	100%	532,133,800			
			26	Operasional Pembinaan Program Oleh Kader (DAK BOKB)		0%	0%	-	-	100%	177,600,000.00	177,600,000.00	100%	195,360,000	100%	214,896,000	100%	236,385,600			
			<b>2.08.01.16</b>	<b>Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga</b>	<b>Terlaksananya Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga</b>		<b>73.00%</b>	<b>100%</b>	<b>199,871,000</b>	<b>199,679,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>259,153,000.00</b>	<b>258,090,450.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>286,757,890.53</b>	<b>100.00%</b>	<b>317,906,169.06</b>	<b>100%</b>	<b>360,137,623.34</b>		
			02	Lomba BKB		80%	80%	17,729,000.00	17,729,000	100%	19,529,000.00	19,529,000.00	100%	21,481,900	100%	23,630,090	100%	25,993,099			
			05	Orientasi Tenaga pengelola kelompok BKB		70%	80%	11,853,000.00	11,853,000	0%	-	-	0%	0	0%	0	0%	0			
			06	Orientasi Tenaga pengelola kelompok UPPKS		70%	90%	10,111,000.00	10,111,000	100%	9,548,000.00	9,053,000.00	100%	9,958,300	100%	10,954,130	100%	12,049,543			
			07	Pengadaan sarana KIE		0%	90%	50,000,000.00	49,808,000	0%	-	-	0%	0	0%	0	0%	0			
			08	Lomba Bina Keluarga Lansia (BKL)		0%	100%	11,631,000	11,631,000	100%	13,431,000.00	13,131,000.00	100%	14,444,100	100%	15,888,510	100%	17,477,361			
			09	Operasional Kader BKB dan BKL		0%	100%	53,259,000.00	53,259,000	100%	55,000,000.00	55,000,000.00	100%	60,500,000	100%	66,550,000	100%	73,205,000			
			10	Operasional Kader BKR (Bina Keluarga Remaja)		0%	100%	11,200,000.00	11,200,000	100%	11,200,000.00	11,200,000.00	100%	12,320,000	100%	13,552,000	100%	14,907,200			
			11	Lomba BKR (Bina Keluarga Remaja)		0%	100%	11,194,000.00	11,194,000	100%	15,295,000.00	15,295,000.00	100%	16,824,500	100%	18,506,950	100%	20,357,645			
			13	Orientasi Tenaga Pengelola Kelompok BKR (Bina Keluarga Remaja)		0%	100%	11,293,000.00	11,293,000	0%	-	-	0%	0	0%	0	0%	0			
			14	Operasional Tribina Percontohan (BKB,BKR dan BKL)		0%	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	0	0%	0	0%	0		
			15	Pembentukan AKU (Asosiasi Kelompok UPPKS)		0%	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	0	0%	0	0%	0		
			16	Dukungan Media KIE dan Manajemen (DAK BOKB)		0%	0%	-	-	100%	135,150,000.00	134,882,450.00	100%	148,370,695	100%	163,207,765	100%	179,528,541			

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran RENSTRA 2020	Realisasi Sasaran Renstra 2020	Program/kegiatan	Anggaran 2020	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6	7
				Pembentukan AKU (Asosiasi Kelompok UPPKS)	-	-
				<b>Program Pengendalian Penduduk</b>	<b>115,236,223</b>	<b>113,569,068</b>
				Pemutaran Film melalui MUPEN KB	8,134,068.00	8,134,068.00
				Pengelolaan Analisa dan Evaluasi Program KB	85,500,120.00	84,090,000.00
				Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	21,602,035.00	21,345,000.00
				Pertemuan Kebijakan Pengendalian Dampak Kependudukan	0	0
				Orientasi Advokasi dan KIE Program KBPK Bagi Mitra Kerja	0	0
				Pengembangan Sekolah Peduli Kependudukan	0	0

Sasaran	Indikator Sasaran	Target RENSTRA	Program/kegiatan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Anggaran 2020	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			Operasional Penggerakan di Kampung KB (DAKBOKB)	458,100,000.00	458,100,000.00	419,855,000.00	384,636,840.00
			Dukungan Media KIE dan Manajemen (DAK BOKB)	168,680,000.00	168,130,000.00	129,050,000.00	129,040,000.00
			<b>Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga</b>	<b>79,762,000</b>	<b>78,629,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Pembinaan Kelompok Tribina Kota Binjai	79,762,000.00	78,629,200.00	-	-
			Pembentukan AKU (Asosiasi Kelompo UPPKS)	-	-	-	-
			<b>Program Pengendalian Penduduk</b>	<b>30,722,000</b>	<b>30,722,000</b>	<b>85,500,120</b>	<b>84,090,000</b>
			Fasilitasi Grand Design Pembangunan Kependudukan	30,722,000.00	30,722,000.00	0	0
			Pengelolaan Analisa dan Evauasi Program KB	-	-	85,500,120.00	84,090,000.00
			Pertemuan Kebijakan Pengendalian Dampak Kependudukan	-	-	0	0
			Orientasi Advokasi dan KIE Program KKBPK bagi Mitra Kerja	-	-	0	0
			Pengembangan Sekolah Peduli Kependudukan (SPK)	-	-	-	-

Binjai, Januari 2021  
Kepala Dinas Pengendalian  
Penduduk dan KB Kota Binjai



Dr. Irena F. ...vati, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630725 198902 2 001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat dalam kelompok tri bina Percontohan	operasional Kelompok tribina  opersional IMP  Lomba-lomba kelompok tribina	1.12.01.01.16	<b>Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga</b>	Outcome : Terlaksananya Pembinaan Kelompok Tribina dan IMP Output: meningkatnya pengetahuan anggota kelompok Tribina Percontohan		73%	80,400,000	80%	88,440,000	82%	97,284,000	85%	107,012,400	90%	117,713,640
				02	Lomba BKB		80%	13,800,000	80%	15,180,000	85%	16,698,000	85%	18,367,800	90%	20,204,580
				05	Orientasi Tenaga pengelola kelompok BKB		70%	12,300,000	80%	13,530,000	80%	14,883,000	80%	16,371,300	90%	18,008,430
				06	Operasional Tribina Percontohan (BKB,BKR dan BKL)		70%	54,300,000	80%	59,730,000	80%	65,703,000	90%	72,273,300	90%	79,500,630

Tabel II.2

## INDIKATOR UTAMA, TARGET DAN REALISASINYA PADA BADAN KB DAN PP KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN

NO	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
	1	2	3	4	5
1.	Tersedianya peraturan tentang kependudukan dan program KB dikota Binjai	%	80	70	87.5
2.	Tersedianya Alkon IUD	Akseptor	768	421	54.82
	terlaksananya MOW	Akseptor	412	266	64.56
	terlaksananya MOP	Akseptor	49	2	4.08
3.	Terlaksananya Sosialisasi tentang Alat Kontrsepsi	keg	1	1	100
4.	Tercapainya target PUS yang berKB	%	40,343	29,970	74.29
5.	Naiknya Persentase CPR	%	70.05	74.29	106
6.	Turunnya persentase TFR	wanita/100 kel	2.4	2.21	92
7.	Turunnya persentase PUS Unmetneed	Akseptor	1	1	100
8.	Bertambahnya jumlah sekolah yang menjadi anggota PIK R	Klmpk PIK-R	40	33	82.3
	Terlaksananya Sosialisasi PIK R	keg	1	1	100
	Terlaksananya Sosialisasi GenRe	keg	1	1	100
9.	<b>Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk</b>	%	<b>1.22</b>	<b>1.43</b>	<b>11600%</b>
	<b>Rasio Akseptor KB</b>	%	<b>75,00</b>	<b>74,29</b>	<b>9900%</b>
10.	Tersedianya buku Umpan Balik	buku/thn	360	360	100
11.	Pemutaran Film KB dengan MUPEN KB	gerak	14	14	100
12.	Operasional Kelompok tribina (BKB,BKR dan BKR)	klmpk BKB klmpk BKR&BKL	71 53	71 53	100 100
	Opersional IMP	kader	299	295	98.6
	Kelompok UPPKS	klmpk	33	33	100
13.	Terlaksananya Forum Anak	keg	1	1	100
	Terbentuknya KPAID	keg	1	1	100
14.	Turunnya jumlah kasus KDRT di Kota Binjai	%	50	26	52

Berdasarkan tabel Indikator Kinerja Utama Badan Kb dan PP Kota Binjai Tahun 2016 diatas dapat di lihat yang sesuai dengan sasaran Strategis RPJMD Kota Binjai terutama yang nomor 9 yaitu Rata-rata laju Pertambahan Penduduk dan rasio Akseptor KB.

Indikator rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk dari arget sebesar 1,22 % dapat terrealisasi sebesar 1,43%. Capaian pesentase 1,43% yang artinya telah tercapai melebihi target yang ditentukan dan faktor pendorong tercapainya target adalah telah dilaksanakannya program KB khususnya pemakaian Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Indikator Rasio Akseptor KB dari target sebesar 75 % dapat terealisasi sebesar 74,29%. Capaian persentase 74,29% yang artinya tercapai hampir sesuai target, adapun faktor pendorong tercapainya hampir sesuai target ini karena KB sudah merupakan kebutuhan masyarakat.

Sampai dengan akhir 2018, angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) diperkirakan 2.21% anak per wanita usia reproduksi. Rincian kondisi umum dari penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana di Kota Binjai adalah sebagai berikut : Tingkat kesertaan ber KB diukur dari angka persentase PUS (Pasangan Usia Subur) yang menjadi peserta KB. Sampai dengan akhir tahun 2016 jumlah peserta KB 2900 peserta dari yang ditargetkan sebanyak 4000 orang dan jumlah PUS diperkirakan sebanyak 2997 pasangan dari yang ditargetkan sebanyak 4034 pasangan, sehingga tingkat kesertaan berKB dari seluruh PUS sebesar 74,29%.

**Tabel 2.3.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai**  
**Tahun 2013 - 2020**

Uraian	ANGGARAN PADA TAHUN KE								REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE								RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-								RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
<b>BELANJA</b>	<b>9.289,179,112.00</b>	<b>8.717,998,033.57</b>	<b>8,927,087,447.67</b>	<b>10,296,889,987.50</b>	<b>9,559,927,795.00</b>	<b>9,937,843,655.00</b>	<b>9,204,919,141.00</b>	<b>7,799,191,956.00</b>	<b>7,767,231,624.00</b>	<b>7,821,033,822</b>	<b>8,224,572,912.00</b>	<b>8,937,177,889.00</b>	<b>8,877,368,827.00</b>	<b>6,813,102,658.00</b>	<b>7,145,344,306.00</b>	<b>6,761,374,138.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Belanja Tidak Langsung</i>	<i>5,931,970,062.00</i>	<i>5,720,258,737.57</i>	<i>6,118,443,087.67</i>	<i>7,308,687,627.50</i>	<i>6,589,414,935.00</i>	<i>6,589,414,935.00</i>	<i>5,659,180,541.00</i>	<i>4,586,509,698.00</i>	<i>5,201,366,955.00</i>	<i>5,494,551,442.00</i>	<i>5,972,021,998.00</i>	<i>6,305,090,851.00</i>	<i>6,183,744,852.00</i>	<i>3,283,615,969.00</i>	<i>3,693,615,969.00</i>	<i>3,690,083,004.00</i>	<i>87.68</i>	<i>96.05</i>	<i>97.61</i>	<i>86.27</i>	<i>93.84</i>	<i>49.83</i>	<i>65.27</i>	<i>80.46</i>	<i>7.43</i>	<i>4.16</i>
Belanja Pegawai/Gaji atau Non gaji	5.931.970.062.00	5.720.258.737.57	6.118.443.087.67	7.308.687.627.50	6.589.414.935.00	6.589.414.935.00	5.659.180.541.00	4.586.509.698.00	5.201.366.955.00	5.494.551.442.00	5.972.021.998.00	6.305.090.851.00	6.183.744.852.00	3.283.615.969.00	3.693.615.969.00	3.690.083.004.00	87.68	96.05	97.61	86.27	93.84	49.83	65.27	80.46	7.43	4.16
<i>Belanja Langsung</i>	<i>3,357,209,050.00</i>	<i>2,997,739,300.00</i>	<i>2,808,644,360.00</i>	<i>2,988,202,360.00</i>	<i>2,970,512,860.00</i>	<i>3,348,428,720.00</i>	<i>3,545,738,600.00</i>	<i>3,212,682,258.00</i>	<i>2,565,864,669.00</i>	<i>2,326,482,380.00</i>	<i>2,252,550,914.00</i>	<i>2,632,087,038.00</i>	<i>2,693,623,975.00</i>	<i>3,529,486,689.00</i>	<i>3,451,728,337.00</i>	<i>3,071,291,134.00</i>	<i>76.43</i>	<i>77.61</i>	<i>80.20</i>	<i>88.08</i>	<i>90.68</i>	<i>105.41</i>	<i>97.35</i>	<i>95.60</i>	<i>1.15</i>	<i>2.06</i>
Belanja Pegawai	885.125.000.00	620.905.000.00	349.000.000.00	468.170.000	694.860.000	420.645.000	165.500.000	720.280.000	885.125.000.00	565.350.000.00	330.300.000.00	434.840.000.00	694.860.000.00	445.765.000.00	163.500.000.00	720.280.000.00	100.00	91.05	94.64	92.88	100.00	105.97	98.79	100.00	1.56	1.70
Belanja Barang Jasa	2,077,360,250.00	1,399,554,300.00	1,210,246,360.00	1,622,725,360.00	2,017,502,860.00	2,451,651,200	3,077,238,600.00	2,013,816,258.00	1,290,735,869.00	1,147,542,380	1,052,961,314.00	1,314,497,038.00	1,744,556,175.00	2,611,876,689.00	2,985,882,337.00	1,873,363,634.00	62.13	81.99	87.00	81.01	86.47	106.54	97.03	93.03	1.05	0.77
Belanja Modal	394,723,800.00	977,280,000.00	1,249,398,000.00	897,307,000.00	258,150,000.00	476,132,520.00	303,000,000.00	478,586,000.00	390,003,800.00	613,590,000	869,289,600.00	882,750,000.00	254,207,800.00	471,845,000.00	302,346,000.00	477,647,500.00	98.80	62.79	69.58	98.38	98.47	99.10	99.78	99.80	2.75	3.72

**Tabel 2.3.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan DPPKB Kota Binjai**  
**tahun 2013 - 2020**

Indikator Kinerja sesuai TUPOKSI	Target IKU	Target IKK	Target Renstra DPPKB Tahun ke								Realisasi Capaian Tahun ke								Rasio Capaian pada Tahun ke							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk)	Persentase LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk)	Turunnya LPP	1.21%	1.21%	1.21%	1.21%	1.21%	1.21%	1.21%	1.21%	1.21%	1.21%	1.21%	1.21%	1.21%	1.21%	1.21%	1.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Persentase Jumlah Peserta KB Aktif (PA)	Persentase Penggunaan kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)/ Peserta KB Aktif (PA) MKJP	Kenaikan Jumlah Peserta KB Aktif	25.00%	25%	24.00%	24.00%	22.00%	22.00%	22.00%	22.00%	23.14%	23%	21.13%	23.46%	24.54%	24.54%	24.54%	24.54%	93%	92%	98%	98%	112%	98%	98%	112%
Persentase Angka Pemakaian Kontrasepsi	Persentase CPR	Naiknya CPR	74.94%	74.18%	73.43%	74.29%	73.53%	73.53%	73.53%	73.53%	72.65%	72.30%	73.98%	74.00%	74.00%	74.00%	74.00%	74.00%	99.52%	99.04%	99.97%	100.00%	100.00%	99.97%	100.00%	100.00%
Persentase Angka Kelahiran Total	Persentase TFR	Turunnya TFR	2.21%	2.21%	2.21%	2.21%	2.21%	2.21%	2.21%	2.21%	2.21%	2.21%	2.21%	2.21%	2.21%	2.21%	2.21%	2.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Persentase Peserta KB Baru	Jumlah Peserta KB Baru (PB)	Bertambahnya PB	74.00%	80%	84.00%	85.00%	85%	85%	85%	85%	74.00%	74%	74.00%	74.00%	74%	74%	74%	74%	100%	93%	88%	87%	87%	88%	87%	87%
Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin anak lagi tapi tidak ber KB	Persentase PUS Unmetneed	Turunnya PUS Unmetneed	12.00%	12.00%	12.00%	12.00%	12.00%	12.00%	12.00%	12.00%	9.77%	9.50%	9.88%	11.18%	12.11%	12.11%	12.11%	12.11%	81.42%	79.17%	82.33%	93.17%	100.92%	82.33%	93.17%	100.92%
Wanita yang menikah pertama usia di bawah 20 Thn	PUS (Pasangan Usia subur) yang istrinya dibawah 20 thn	Turunnya PUS yang istri dibawah 20 thn	600 org	600 org	600 org	600 org	600 org	600 org	600 org	600 org	600 org	634 org	634 org	600 org	634 org	634 org	634 org	634 org	100%	95%	95%	100%	95%	95%	100%	95%
Persentase Remaja yang melahirkan antara 15 - 19 Tahun	Angka Kelahiran Remaja Perempuan per 1000 perempuan usia 15 -19 tahun	Penurunan kelahiran bagi remaja perempuan usia 15-19 thn	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	55.30%	63.40%	63.40%	55.30%	63.40%	63.40%	63.40%	63.40%	92.17%	94.64%	94.64%	92.17%	105.66%	105.66%	92.17%	105.66%

**Tabel. 7.1**  
**Indikator kinerja DPPKB Kota Binjai**  
**Tahun 2016 - 2021**

NO	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja Awal RPJMD ( Tahun 2016)	Target Capaian	Realisasi	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			
			TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk)	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
2.	Persentase Faskes dan Jejaring yang bekerjasama dengan BPJS dalam melayani pemasangan kontrasepsi dan terintegrasi dengan DPPKB Kota Binjai	34 faskes	34 fas kes	34 fas kes	34 fas kes	38 fas kes	38 fas kes	38 fas kes
3.	Persentase CPR	74.29	74	73.53	74	75	75	75
4.	Persentase TFR	2.32	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21
5.	Persentase PUS Unmetneed	12	12	12:11	11.2	10.1	9.85	9.05
6.	Jumlah anggota BKB,BKR,BKL dan UPPKS yang ber KB :	4250 org	5000 org	4760 org	5000 org	5500 org	5500 org	6000 org
7.	Jumlah Kelompok PIK-R :	66 klpk	66 klpk	66 klpk	66 klpk	66 klpk	132 klpk	132 klpk
8.	Jumlah Kelompok BKB :	71 klpk	71 klpk	71 klpk	75 klpk	75 klpk	80 klpk	80 klpk
9.	Jumlah Kelompok BKR :	53 klpk	53 klpk	53 klpk	53 klpk	53 klpk	53 klpk	53 klpk
10.	Jumlah Kelompok BKL :	53 klpk	53 klpk	53 klpk	53 klpk	53 klpk	53 klpk	53 klpk
11.	Jumlah Kelompok UPPKS :	33 klpk	33 klpk	33 klpk	33 klpk	33 klpk	33 klpk	33 klpk
12.	Usia Kawin Pertama (UKP) bagi wanita (tahun)	20	20	21	21	21	21	22
13.	Angka Kelahiran Remaja Perempuan per 1000 perempuan usia 15 -19 tahun	63.4	65	63.4	51	47.9	46	39.5

MISI 5 RPJMD : "Mewujudkan pemerintahan yang cerdas (Smart Governance) melalui birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya"																			
TUJUAN RPJMD	TUJUAN DPPKB	SASARAN RPJMD	SASARAN DPPKB	KATOR SASARAN RP	KONDISI AWAL 2016	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN KE						INDIKATOR SASARAN DINAS PPKB	KONDISI AWAL 2016	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN KE					
						2017		2018	2019	2020	2021			2017		2018	2019	2020	2021
						Target	Realisasi							Target	Realisasi				
Meningkatkan kualitas Standar hidup ( Smart Living) dalam Aspek Kelayakan, Kesejahteraan, Keadilan dan kenyamanan	Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk dengan Program KKBP ( Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga )	Mewujudkan Peningkatan kualitas standar hidup layak, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan	Terlaksananya Pembinaan Program KKPBK kepada kelompok- kelompok kegiatan (POKTAN) yang ada di Masyarakat;	1 Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	1.22	1.22	1.22	1.22	1.21	1.21	1.21	1	Jumlah Kelompok PIK-R :	66 klpk	66 klpk	66 klpk	66 klpk	132 klpk	132 klpk
												2	Jumlah Kelompok BKB :	71 klpk	71 klpk	75 klpk	75 klpk	80 klpk	80 klpk
												3	Jumlah Kelompok BKR :	53 klpk	53 klpk	53 klpk	53 klpk	53 klpk	53 klpk
												4	Jumlah Kelompok BKL :	53 klpk	53 klpk	53 klpk	53 klpk	53 klpk	53 klpk
												5	Jumlah Kelompok UPPKS :	33 klpk	33 klpk	33 klpk	33 klpk	33 klpk	33 klpk
												6	Usia Kawin Pertama (UKP) bagi wanita (tahun)	20	20	21	21	21	22
												7	Angka Kelahiran Remaja Perempuan per 1000 perempuan usia 15 -19 tahun	63.4	65	63.4	51	47.9	46

TABEL 4.1  
TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DPPKB

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN		TARGET KINERJA PADA TAHUN KE				
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2017	2018	2019	2020	2021
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana kepada Masyarakat	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk)	1.21	1.21	1.21	1.19	1.19
	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai untuk Pelayanan Keluarga Berencana	Persentase Faskes dan Jejaring yang bekerjasama dengan BPJS dalam melayani pemasangan kontrasepsi dan terintegrasi dengan DPPKB Kota Binjai	34 fas kes	34 fas kes	38 fas kes	38 fas kes	38 fas kes
	Meningkatnya Angka Pemakaian Kontrasepsi	Persentase CPR	73.53	74	75	75	75
	Menurunkan TFR (Total Fertility Rate) atau menurunkan persentase rata-rata jumlah total anak yang dilahirkan diusia subur;	Persentase TFR	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21
	Menurunnya Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin anak tapi tidak ber KB	Persentase PUS Unmetneed	12:11	11.2	10.1	9.85	9.05
	Meningkatnya jumlah anggota Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS	Jumlah anggota BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang ber KB :	5000 org	5000 org	5500 org	5500 org	6000 org
Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk dengan Program KKBPK ( Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga )	Terlaksananya Pembinaan Program KKBPK kepada kelompok-kelompok kegiatan (POKTAN) yang ada di Masyarakat;	Jumlah Kelompok PIK-R :	33 klpk	66 klpk	132 klpk	132 klpk	132 klpk
		Jumlah Kelompok BKB :	71 klpk	71 klpk	75 klpk	80 klpk	80 klpk
		Jumlah Kelompok BKR :	53 klpk	53 klpk	53 klpk	53 klpk	53 klpk
		Jumlah Kelompok BKL :	53 klpk	53 klpk	53 klpk	53 klpk	53 klpk
		Jumlah Kelompok UPPKS :	33 klpk	33 klpk	33 klpk	33 klpk	33 klpk
	Pembinaan dan Konseling bagi Calon Pengantin (CaTin)	Usia Kawin Pertama (UKP) bagi wanita (tahun)	21 thn	21 thn	21 thn	21 thn	22 thn
	Menurunnya angka kelahiran remaja perempuan usia 15-19	Angka Kelahiran Remaja Perempuan per 1000 perempuan usia 15-19 tahun	63.40%	51%	47.90%	46%	39.50%

TABEL 5.1  
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM / KEGIATAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	KEGIATAN				
					KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)						
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana kepada Masyarakat	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Melaksanakan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Binjai	Menyusun Draft Peraturan Tentang Kependudukan pada Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Binjai	1. Persentase LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk)	belum ada perda/Perwa tentang Grand Design Kependudukan	1 bh Perwa	Keluarga Berencana	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan				
	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai untuk Pelayanan Keluarga Berencana	Perencanaan Pengnadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB pada penyusunan Renja Tahunan DPPKB	Menyediakan Alokon di tiap Faskes terutama untuk ibu yang habis melahirkan	2. Persentase Faskes dan Jejaring yang bekerjasama dengan BPJS dalam melayani pemasangan kontrasepsi dan terintegrasi dengan DPPKB Kota Binjai	34 faskes	38 faskes	Pembinaan Peran Serta masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri	Operasional Distribusi Alokon				
	Meningkatnya Angka Pemakaian Kontrasepsi	Mengadakan Sosialisasi Program KB	Menyediakan Narasumber yang Ahli di bidang Alokon Modern pada kegiatan Sosialisasi	3. Persentase CPR	74.29	75	Pelayanan Kontrasepsi	Orientasi tentang Alokon Modern				
	Menurunkan TFR (Total Fertility Rate) atau menurunkan persentase rata-rata jumlah total anak yang dilahirkan diusia subur;	Mengadakan Sosialisasi Program KB	Menyediakan Narasumber yang Ahli di bidang Alokon Modern pada kegiatan Sosialisasi	4. Persentase TFR	2.31	2.21	Pelayanan Kontrasepsi	Orientasi tentang Alokon Modern				
	Menurunnya Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin anak tapi tidak ber KB	Mengadakan Sosialisasi tentang Unmetneed	menetapkan target PUS Unmetneed yang wajib turun tiap tahun	5. Persentase PUS Unmetneed	12	9.05	Pelayanan Kontrasepsi	Sosialisasi Unmetneed				
	Meningkatnya jumlah anggota Kelompok BKB, BKR ,BKl dan UPPKS yang ber KB	Melaksanakan Pembinaan POKTAN	Menyediakan Narasumber yang Ahli di bidang KKBPK( Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga) pada kegiatan Sosialisasi	6. Jumlah anggota BKB,BKR,BKL dan UPPKS yang ber KB :	4250 org	6000 org	Program Penyiapan Tenaga Pendamping	Orientasi BKB, BKR dan BKL serta UPPKS				
Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk dengan Program KKBPK ( Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga )	Terlaksananya Pembinaan Program KKBPK kepada kelompok- kelompok kegiatan (POKTAN) yang ada di Masyarakat;	Melaksanakan Pembinaan POKTAN	Mengusulkan dana Operasional untuk Kader POKTAN di Lapangan	7. Jumlah Kelompok PIK-R :	66 klpk	132 klpk	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Operasional Kader Tribina dan UPPKS				
				8. Jumlah Kelompok BKB :	71 klpk	80 klpk						
				9. Jumlah Kelompok BKR :	53 klpk	53 klpk						
				10. Jumlah Kelompok BKL :	53 klpk	53 klpk						
				11. Jumlah Kelompok UPPKS :	53 klpk	53 klpk						
				12. Usia Kawin Pertama (UKP) bagi wanita (tahun)	20 th	22 thn						
	Pembinaan dan Konseling bagi Calon Pengantin (CaTin)	Meningkatkan pelayanan KB kepada Calon Pengantin (CaTin) /PUS (Pasangan Usia Subur)	Pelaksanaan Sosialisasi bagi PUS/ Catin	Menetapkan peraturan tentang syarat menikah/ pembinaan calon Pengantin	13. Angka Kelahiran Remaja Perempuan per 1000 perempuan usia 15 -19 tahun	63.40%	39.50%	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera)			
					Mengadakan Sosialisasi/ pembinaan oleh kader kepada masyarakat tentang bahaya kawin dibawah umur	Menetapkan peraturan tentang syarat menikah/ pembinaan calon Pengantin	Menetapkan peraturan tentang syarat menikah/ pembinaan calon Pengantin	Menetapkan peraturan tentang syarat menikah/ pembinaan calon Pengantin	Menetapkan peraturan tentang syarat menikah/ pembinaan calon Pengantin	Menetapkan peraturan tentang syarat menikah/ pembinaan calon Pengantin	Menetapkan peraturan tentang syarat menikah/ pembinaan calon Pengantin	Menetapkan peraturan tentang syarat menikah/ pembinaan calon Pengantin

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		2.8.01.25	Program Pengendalian Penduduk	Persentase pertumbuhan penduduk	0	-	0	-	0	-	1.21	-	1.21	-	1.21	-	1.21	-	DPPKB KOTA BINJAI	
		1	Entri Data MDK (Pemutakhiran Data Keluarga)	Data KB ter Update	1 keg	24.600,000	0 keg	0	0 keg	0	0 keg	0	0 keg	0	1 keg	0	1 keg	0	DPPKB KOTA BINJAI	
		2	Pengelolaan Analisa dan Evaluasi Program	Monev program KB terpenuhi	100%	17.300,000	0%	-	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-	0%	-	DPPKB KOTA BINJAI	
		3	Penyusunan Grand desain Pembangunan Kependudukan	tersedia Perwa tentang GDPK	100%	12.220,000	100%	100.000,000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-	0%	-	DPPKB KOTA BINJAI	
		4	Updading Data Keluarga (di Kampung KB)	data Keluarga ter Update	100%	72.850,000	0%	-	100%	30.350,000	100%	33.385,000	100%	36.723,500	100%	36.723,500	100%	36.723,500	DPPKB KOTA BINJAI	
		5	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	data tersusun baik	100%	37.400,000	100%	61.200,000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-	0%	-	DPPKB KOTA BINJAI	
		6	Workshop Sekolah Peduli Kependudukan	tiap sekolah tau tentang Kependudukan	0 keg	0	0 keg	0	1 keg	50.100,000	1 keg	52.605,000	1 keg	55.235,250	1 keg	55.235,250	1 keg	55.235,250	DPPKB KOTA BINJAI	
		7	Pertemuan Kebijakan Pengendalian Dampak Kependudukan	tersedia perjalanan Dinas	0 keg	0	0 keg	0	1 keg	25.000,000	1 keg	26.250,000	1 keg	27.562,500	1 keg	27.562,500	1 keg	27.562,500	DPPKB KOTA BINJAI	
		8	Orientasi Advokasi dan KIE Program KKBPK bagi Mitra Kerja	meningkat pengetahuan Mitra Kerja tentang Prog. KKBPK	0%	0	0%	0	0%	16.000,000	0%	16.800,000	0%	17.640,000	0%	17.640,000	0%	17.640,000	DPPKB KOTA BINJAI	
		9	Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Binjai	tersedia perda/ perwa tentang kependudukan di Binjai	0 keg	0	0 keg	0	1 keg	16.000,000	1 keg	16.800,000	1 keg	17.640,000	1 keg	17.640,000	1 keg	17.640,000	DPPKB KOTA BINJAI	
		10	Desiminasi rancangan Induk Pengendalian Kuantitas Kependudukan	tersedia rancangan induk pengendalian penduduk	100%	9.910,000	0%	-	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	DPPKB KOTA BINJAI	
		11	Orientasi Koalisi Kependudukan Kota Binjai	tersedia koalisi kependudukan kota Binjai	100%	7.645,000	0%	-	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	DPPKB KOTA BINJAI	
		12	Pilot Project Pengembangan Sekolah Peduli Kependudukan	tersedia sekolah peduli kependudukan	0 keg	0	0 keg	0	1 keg	16.000,000	1 keg	16.800,000	1 keg	17.640,000	1 keg	17.640,000	1 keg	17.640,000	17.640,000	DPPKB KOTA BINJAI
		13	Pengembangan Rumah Data di Kampung KB	tersedia rumah data di kampung KB	0 Kpng KB	0	0 Kpng KB	0	5 Kpng KB	16.000,000	5 Kpng KB	16.800,000	5 Kpng KB	17.640,000	5 Kpng KB	17.640,000	5 Kpng KB	17.640,000	DPPKB KOTA BINJAI	